

**PENGARUH TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KORPORASI  
BERBASIS *WEBSITE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN  
PERUSAHAAN, & PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA  
(STUDI PADA BUMN TERDAFTAR BEI PERIODE 2020-2024)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RAYHANA QURROTA AINI  
2211031137**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PENGARUH TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KORPORASI  
BERBASIS *WEBSITE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN  
PERUSAHAAN, & PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA  
(STUDI PADA BUMN TERDAFTAR BEI PERIODE 2020-2024)**

**OLEH**

**RAYHANA QURROTA AINI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KORPORASI BERBASIS *WEBSITE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, & PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI PADA BUMN TERDAFTAR BEI PERIODE 2020-2024)**

**Oleh**

**RAYHANA QURROTA AINI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW), kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024. Metode yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel TPIKBW dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, variabel kepemilikan institusional dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Koefisien determinasi penelitian sebesar 0,107 menunjukkan bahwa kemampuan variabel TPIKBW, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dalam menjelaskan praktik manajemen laba sebesar 10,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

**Kata Kunci:** Manajemen Laba, Pengungkapan Berbasis *Website*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF WEBSITE BASED CORPORATE INFORMATION DISCLOSURE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, FIRM SIZE, AND PROFITABILITY ON EARNINGS MANAGEMENT ( STUDY OF STATE-OWNED ENTERPRISES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE PERIOD 2020–2024)**

**By**

**RAYHANA QURROTA AINI**

*This study aims to examine the effect of the level of website based corporate information disclosure (WBCID), institutional ownership, firm size, and profitability on earnings management. This research employs a quantitative approach. The population of this study consists of State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results indicate that the level of website based corporate information disclosure and firm size have no significant effect on earnings management. Meanwhile, institutional ownership and profitability have a positive effect on earnings management. The coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.231 indicates that the variables of website-based corporate information disclosure, institutional ownership, firm size, and profitability are able to explain 10.7% of the variation in earnings management practices, while the remaining 89.3% is explained by other factors outside the model.*

**Keywords:** *Earnings Management, Website Based Disclosure, Institutional Ownership, Firm Size, Profitability*

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

:Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi  
Korporasi Berbasis *Website*, Kepemilikan  
Institusional, Ukuran Perusahaan, dan  
Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi  
pada BUMN Terdaftar BEI Periode 2020-2024)

Nama Mahasiswa

: **Rayhana Qurrota Aini**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2211031137**

Jurusan

: **Akuntansi**



**Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Ak., CPA**

NIP. 19751026 20021 2 2002

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti'.

**Dr. Agrianti Komala Sari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA**

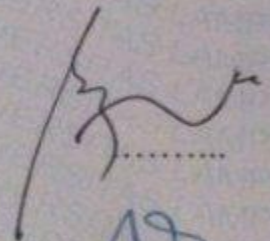
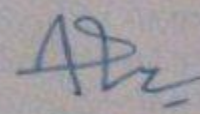
NIP. 19700801 199512 2 001



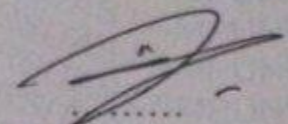
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Ak., CPA**

  
.....  
  
.....

Penguji Utama: **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.**

  
.....

Penguji Kedua: **Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak.**

### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si**

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Januari 2026**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rayhana Qurrota Aini

NPM : 2211031137

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN Terdaftar BEI Periode 2020-2024)”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Yang menyatakan



Rayhana Qurrota Aini

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Rayhana Qurrota Aini, lahir di Kotabumi. 29 Agustus 2004. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di TK, SD, SMP, dan SMKN lulus pada tahun 2022.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi, yaitu menjadi Sekretaris Umum UKPM-F Pilar Ekonomi FEB Unila 2024 dan Staf KSEI Fossei ROIS FEB Unila. Penulis juga pernah mengikuti dan memenangkan lomba internasional dan nasional baik karya tulis ilmiah, *business plan*, olimpiade, dan lomba cepat tepat akuntansi.



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan kasih dan rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, senantiasa memberikan perlindungan, serta membimbing dengan petunjuk-Nya dalam setiap langkah perjuangan. Berkat pertolongan dan kehendak-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang dengan perjuangan dan keteladanannya menjadi cahaya dalam setiap langkah kehidupan.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

### **Orang Tuaku: Umi dan Abi**

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang sepanjang hidupnya selalu mengutamakan kebahagiaan penulis di atas segalanya. Dengan penuh keikhlasan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah habis, mereka hadir sebagai penopang utama dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Semoga Allah membalas seluruh pengorbanan dan keikhlasan dengan kebahagiaan yang sempurna.

### **Adik-Adikku: Muhammad, Khumairoh, dan Fatimah**

Adik-adiku yang tanpa disadari telah menjadi alasan terbesarku untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan panjang ini. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat menjadi langkah kecil yang menginspirasi kalian untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

## **MOTTO**

**Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak (pula) membencimu.**

-Q.S Adh Dhuha ayat 3

**dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!**

-Q.S Al- Insyirah ayat 8

**Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu, dan**

**Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalanmu.**

-Sepotong Khutbah Terakhir Rasulullah SAW

## SANCAWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, dan ampunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN terdaftar BEI Periode 2020-2024)” untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Sebagai bentuk syukur atas atas nikmat kelulusan sidang skripsi yang sudah diterima, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mengiringi perjalanan penulisan skripsi ini.

1. **Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. **Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA dan Ibu Dr. Retno Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak.,CA** selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. **Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak., CPA.**, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, motivasi, perhatian, dan kesabaran yang Ibu berikan kepada penulis selama masa bimbingan. Penulis tidak akan bisa mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan kebaikan hati Ibu. Penulis menyampaikan permohonan maaf atas sikap maupun kata yang kurang berkenan selama proses bimbingan.
4. **Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.**, selaku Dosen Pembahas 1. Terima kasih atas waktu, ilmu, kesabaran, dan bantuan ibu dalam memberikan saran dan kritik yang membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf jika selama proses belajar terdapat sikap dan kata yang kurang berkenan.

5. **Ibu Neny Desriani S.E., M.Sc., Akt.**, selaku Dosen Pembahas 2. Terima kasih atas waktu, ilmu, kesabaran, dan bantuan ibu dalam memberikan saran dan kritik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf jika selama proses belajar terdapat sikap dan kata yang kurang berkenan.
6. **Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.Sa., CA., Akt.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas waktu, ilmu, motivasi, dan bantuan ibu yang membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. **Orang tuaku: Abi dan Umi**, Terima kasih untuk kasih sayang dan doa yang tiada jeda. Banyak sekali kebaikan yang penulis terima selama ini dan penulis yakin itu semua karena doa-doa yang selalu dipanjatkan beliau.
8. **Adik-Adikku:** Muhammad Sajid, Camila Khumairoh, dan Fatimah Azzahra, yang menjadi motivasi penulis agar mampu menjadi pintu awal pembuka gerbang kehidupan yang lebih baik lagi.
9. **Teman-temanku:** Syartika, Febi, Rizka, Devina, dan Tami, terima kasih telah menjadi tempat berbagi, bertanya, dan meminta bantuan selama masa `perkuliahan. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan skripsi, Anak Bimbingan Bu Reni Squad: Talitha, Ghina, Imel, dan Ilham.
10. **Presidium UKPM-F Pilar Ekonomi:** Terima kasih telah menjadi wadah penulis untuk berkembang, terima kasih telah memberikan kenangan yang indah, terima kasih telah banyak mengajarkan banyak hal, terkhusus untuk Presidium Pilar 2024: Alma, Lusmelia, Wina, Farras, Dhea, Endi, Lusi, Rafa, Mikha, dan Sandi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026



Rayhana Qurrota Aini



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Keagenan.....	12
2.2 Variabel Penelitian .....	14
2.2.1 Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis <i>Website</i> (TPIKBW) .....	14
2.2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2015` .....	18
2.2.3 Kepemilikan Institusional .....	20
2.2.4 Ukuran Perusahaan .....	22
2.2.5 Profitabilitas.....	23
2.2.6 Manajemen Laba.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	33
2.4 Kerangka Berpikir .....	35
2.5 Pengembangan Hipotesis .....	35

2.5.1 Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis <i>Website</i> (TPIKBW) terhadap Manajemen Laba .....	35
2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba .....	38
2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba .....	39
2.5.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba .....	41
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Metode Penelitian .....	43
3.2 Populasi Dan Sampel .....	44
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel .....	45
3.3.1 Variabel Dependen .....	45
3.3.2 Variabel Independen .....	47
3.4 Metode Analisis Data .....	51
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	51
3.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
3.4.3 Analisis Regresi Berganda .....	53
3.4.4 Uji Hipotesis .....	53
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	55
4.2 Analisis Statistik Deskriptif Sebelum <i>Outlier</i> .....	56
4.3 Uji Asumsi Klasik Sebelum <i>Outlier</i> .....	59
4.3.1 Uji Normalitas .....	59
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	59
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	60
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	61
4.4 Analisis Statistik Deskriptif Setelah <i>Outlier</i> .....	62
4.3 Uji Asumsi Klasik Setelah <i>Outlier</i> .....	64
4.3.1 Uji Normalitas .....	64

4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	65
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	66
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	66
4.4 Uji Regresi Linear Berganda .....	67
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R2</i> ).....	69
4.4.2 Uji Parsial (Uji t).....	69
4.4.3 Uji f .....	72
4.5 Pembahasan .....	72
4.5.1 Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis <i>Website</i> (TPIKBW) terhadap manajemen laba.....	72
4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba .....	78
4.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba .....	83
4.5.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba .....	86
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Keterbatasan .....	92
5.3 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kasus Korupsi di Indonesia.....	3
Gambar 1. 2 Kasus Korupsi BUMN Tahun 2016-2021.....	3
Gambar 1. 3 Kerugian Negara Akibat Korupsi.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	35
Gambar 4. 1 Rata-Rata TPIKBW Tahun 2020-2024 .....	75
Gambar 4. 2 Perbandingan TPIKBW dan Manajemen Laba Tahun 2020-2024 ..	77
Gambar 4. 3 Rata-Rata Kepemilikan Institusional Tahun 2020-2024.....	81
Gambar 4. 4 Perbandingan Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba Tahun 2020-2024 .....	82
Gambar 4. 5 Rata-Rata ROA Tahun 2019-2023 .....	88
Gambar 4. 6 Perbandingan ROA dan Manajemen Laba.....	89



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Laporan Laba Rugi PT PLN Tahun 2017-2018.....	4
Tabel 2.1 Indikator Pengukuran Pengungkapan .....	16
Tabel 2.2 Sub Item Pengungkapan POJK No. 8 Tahun 2015 .....	18
Tabel 2. 3 Indikator Pengukuran Kepemilikan Institusional .....	21
Tabel 2. 4 Indikator Pengukuran Ukuran Perusahaan.....	23
Tabel 2. 5 Indikator Pengukuran Profitabilitas .....	25
Tabel 2. 6 Indikator Pengukuran Manajemen Laba .....	31
Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3. 1 Sub Item Pengungkapan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015 .....	47
Tabel 3. 2 Indikator Pengukuran Seluruh Variabel.....	50
Tabel 4. 1 Penentuan Sampel Penelitian .....	55
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan Sampel .....	56
Tabel 4. 3 Analisis Statistik Deskriptif Sebelum <i>Outlier</i> .....	56
Tabel 4. 4 Uji Normalitas Sebelum <i>Outlier</i> .....	59
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas Sebelum <i>Outlier</i> .....	60
Tabel 4. 6 Uji Heterokedastisitas Sebelum Transformasi.....	60
Tabel 4. 7 Data Teridentifikasi <i>Outlier</i> .....	61
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi Sebelum <i>Outlier</i> .....	61
Tabel 4. 9 Analisis Statistik Deskriptif Setelah <i>Outlier</i> .....	62
Tabel 4. 10 Uji Normalitas Setelah <i>Outlier</i> .....	65
Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas Setelah <i>Outlier</i> .....	65
Tabel 4. 12 Uji Heteroskedastisitas Setelah <i>Outlier</i> .....	66
Tabel 4. 13 Uji Autokorelasi Setelah <i>Outlier</i> .....	66
Tabel 4. 14 Uji Regresi Linear Berganda.....	67
Tabel 4. 15 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	69
Tabel 4. 16 Hasil Uji t .....	70

Tabel 4. 17 Hasil Uji f.....	72
Tabel 4. 18 Rata-Rata TPIKBW Per Kategori Tahun 2020-2024 .....	76
Tabel 4. 19 Struktur Kepemilikan BUMN Tahun 2020-2024 .....	81
Tabel 4. 20 Rasio ROA Per Sektor Tahun 2019-2023.....	89

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan laba rugi merupakan bagian krusial dari laporan keuangan karena menyajikan informasi mengenai laba perusahaan. Laba umumnya dimanfaatkan sebagai indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan dan keberhasilan manajer dalam menjalankan operasional. Hal ini menjadikan laba sebagai fokus utama bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan (Mesioye & Bakare, 2024). Adanya tekanan untuk manajer agar memenuhi ekspektasi pasar mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik atau laba dikelola untuk menghasilkan hasil yang sesuai diinginkan (Arum & Wahyudi, 2020). Manajer akan cenderung mengatur laba dan melaporkan laba yang besar untuk menarik perhatian investor walaupun tidak sesuai dengan kinerja nyata perusahaan (Safta *et al.*, 2020). Tindakan praktik mengatur laba ini dikenal dengan istilah manajemen laba (Ronibasa & Siregar, 2020).

Praktik manajemen laba mendorong terjadinya ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan informasi dapat menyebabkan kesalahan penetapan keputusan dan pelanggaran peraturan. Hal ini disebabkan manajer memanfaatkan keleluasaan memilih metode untuk memengaruhi informasi yang disampaikan. Praktik manajemen laba juga dianggap tidak etis apabila manajer tidak mengungkapkan tindakannya secara transparan (Sulistiawan *et al.*, 2024). Hal ini dikarenakan manajemen laba secara sadar menipu pemangku kepentingan dengan informasi yang tidak andal (Kurniawansyah, 2018). Ketika praktik ini dilakukan secara berulang dan tidak terdeteksi, manajer dapat terbiasa melakukan manipulasi akuntansi dalam skala kecil. Kondisi tersebut membuka peluang bagi praktik manajemen laba untuk berkembang menjadi kecurangan yang lebih serius, seperti *fraud*.

Manajemen laba dapat menjadi pintu awal terjadinya *fraud* karena praktik ini berada pada area abu-abu yang masih sesuai dengan standar akuntansi namun dapat digunakan secara oportunistik untuk mencapai target tertentu. Menurut Powell *et al.* (2005) bahwa banyak skandal keuangan besar bermula dari praktik manajemen laba berskala kecil yang masih wajar dilakukan untuk memenuhi ekspektasi laba. Ketika tekanan untuk meningkatkan kinerja dan target, manajemen laba akan berkembang menjadi tindakan yang lebih agresif untuk menjaga citranya hingga akhirnya memasuki ranah *fraud*. Menurut Dechow *et al.* (1996) perusahaan akan cenderung melakukan *fraud* ketika praktik manajemen laba memiliki keterbatasan dan tidak mampu menutupi kegagalan perusahaan dalam memastikan ekspektasi laba terpenuhi.

Praktik manajemen laba sering dinilai sebagai faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap manajer perusahaan dan kredibilitas akuntan dalam menyajikan informasi keuangan. Praktik ini membuat Indonesia menempati posisi tertinggi ke-3 se Asia Tenggara dengan kategori negara paling banyak mengalami kasus *fraud* (ACFE, 2024). Hal ini dibuktikan atas survei yang dilakukan oleh *Association Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2024 yang menunjukkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Pada Gambar 1.1 terlihat tahun 2016 terdapat 42 kasus, tahun 2018 terdapat 29 kasus, tahun 2020 terdapat 36 kasus, tahun 2022 terdapat 23 kasus, dan tahun 2024 terdapat 25 kasus korupsi. Dari Gambar 1.1 Indonesia mengalami penurunan kasus korupsi, namun tetap menunjukkan masih maraknya kasus korupsi di Indonesia.

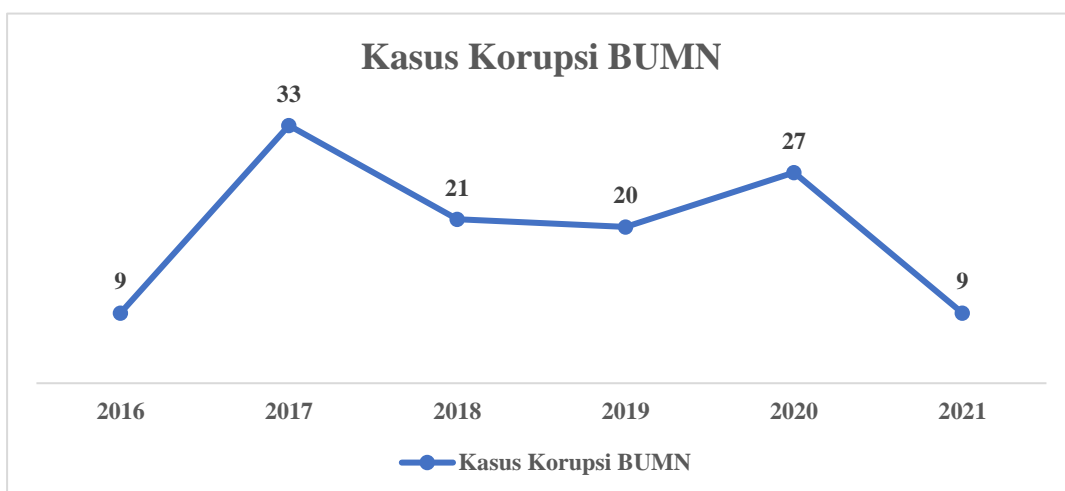




Sumber: Data diolah dari ACFE (2024-2016)

**Gambar 1. 1 Kasus Korupsi di Indonesia**

Hal ini didukung oleh data *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2022) bahwa banyak sekali kasus pada BUMN terkait skandal keuangan di lingkungan yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Berdasarkan laporan terdapat 9 kasus pada 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus pada 2018, 20 kasus pada 2019, 27 kasus pada 2020, dan 9 kasus pada tahun 2021. Selama 6 tahun terakhir total kasus korupsi di BUMN sebanyak 119 kasus. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dikutip dari Liputan (2019) mengatakan para direksi BUMN yang melakukan praktik korupsi dan menyebut mereka sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Kondisi tersebut bukan hanya kasus pelanggaran administratif, namun menghasilkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.



Sumber: ICW (2022)

**Gambar 1. 2 Kasus Korupsi BUMN Tahun 2016-2021**

Salah satu contoh BUMN yang awalnya melakukan manajemen laba kemudian dapat menjadi sinyal *fraud*, yaitu PT PLN yang merupakan perusahaan listrik milik negara. Pada tahun 2018, PT PLN berhasil meningkatkan pendapatan menjadi Rp272,89 triliun dari sebelumnya Rp255,29 triliun pada tahun 2017. Meski demikian, pertumbuhan pendapatan hanya tercatat sebesar 6,89 persen, jauh menurun dibandingkan pertumbuhan 14,57 persen pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, beban usaha justru mengalami peningkatan dari Rp275,47 triliun menjadi Rp308,18 triliun. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya rugi selisih kurs yang melonjak dari Rp2,93 triliun menjadi Rp10,92 triliun atau naik sebesar 272,27 persen.

Berdasarkan tabel 1.1 secara perhitungan matematis antara pendapatan yang tumbuh lambat, beban usaha yang meningkat, dan kerugian kurs yang meningkat seharusnya menekan laba perusahaan. Namun, PT PLN tetap mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp11,56 triliun. Laba PT PLN menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kerugian pada tahun 2014, 2017, dan 2018. Ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan, manajer perlu mengenali penyebab utama krisis dan mencari solusi untuk menanganinya.

**Tabel 1. 1 Laporan Laba Rugi PT PLN Tahun 2017-2018**

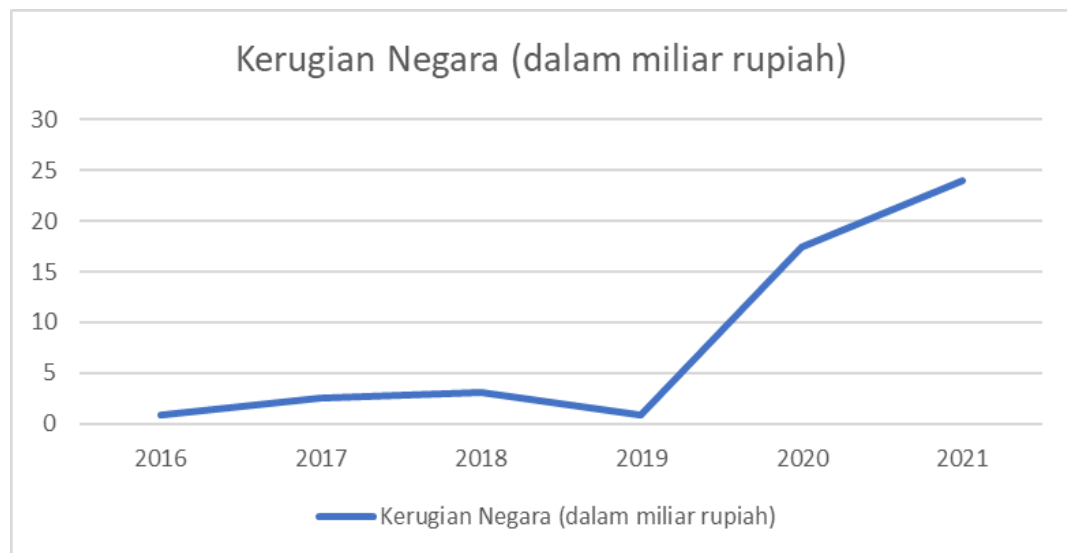
(Dalam Rupiah)	2018	2017
Total Pendapatan Usaha	272.897.742.000.000	255.295.243.000.000
Total Beban Usaha	308.188.889.000.000	275.474.094.000.000
Rugi Usaha Sebelum Subsidi	(35.291.147.000.000)	(20.178.851.000.000)
Subsidi listrik Pemerintah	48.101.754.000.000	45.738.215.000.000
<b>Pendapatan kompensasi</b>	<b>23.173.464.000.000</b>	<b>0</b>
Laba Usaha Setelah Subsidi	35.984.071.000.000	25.559.364.000.000
<b>Penghasilan lain-lain bersih</b>	<b>15.663.363.000.000</b>	<b>3.409.941.000.000</b>
Kerugian kurs mata uang asing- bersih	(10.926.741.000.000)	(2.935.144.000.000)
Penghasilan keuangan	804.321.000.000	1.066.842.000.000
Beban keuangan	(21.624.176.000.000)	(18.556.931.000.000)
Laba Sebelum Pajak	19.900.838.000.000	8.544.072.000.000
Beban Pajak	(8.325.082.000.000)	(4.115.955.000.000)
Laba Tahun Berjalan	11.575.756.000.000	4.428.117.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (2018)

Kenaikkan laba PLN setelah ditelaah kembali ada dua catatan yang dilakukan manajemen untuk memperbaiki dan mempercantik laporan keuangan PT PLN seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1. Pertama, adalah pengakuan piutang

kompensasi dari pemerintah sebesar Rp23,17 triliun, yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan keuangan tahun 2017. Piutang kompensasi ini diakui sebagai pendapatan berdasarkan akuntansi akrual, padahal secara kas belum ada realisasi penerimaan. Kedua, adalah pendapatan lain-lain bersih yang naik drastis dari Rp3,40 triliun menjadi Rp15,66 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari piutang pemerintah sebesar Rp7,45 triliun serta penyesuaian harga pembelian bahan bakar dan pelumas yang melonjak lebih dari 400 persen (CNBC, 2019). Di sisi lain, Direktur Keuangan PLN menyatakan bahwa laba dicapai karena peningkatan penjualan dan efisiensi operasional, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan DMO batubara. Hal ini menunjukkan bahwa internal perusahaan tidak transparan dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, dapat dilihat bahwa manajemen laba menyebabkan menurunnya kualitas informasi dalam laporan keuangan. Informasi yang bias tersebut berisiko menyesatkan investor serta pihak eksternal lain dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, pemangku kepentingan yang mengandalkan laporan keuangan berpotensi mengalami kerugian akibat dari praktik manajemen laba.



Sumber: ICW (2022)

**Gambar 1. 3 Kerugian Negara Akibat Korupsi**

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kasus praktik ini secara nyata memberikan dampak yang sangatlah merugikan negara. Menurut hasil laporan terdapat kerugian sebesar Rp17.403.661.831.180 pada tahun 2020, dan kerugian sebesar Rp23.907.457.559.129 pada tahun 2021. Total kerugian negara pada tahun 2016-2021 adalah senilai Rp47.926.674.165.808. Hal ini sangat ironis bahwa badan usaha yang dimiliki langsung oleh pemerintah menunjukkan ketidakprofesionalisme dan rendahnya tata kelola di pemerintahan sendiri (ICW, 2022).

Kasus yang terjadi memunculkan pertanyaan terhadap bagaimana peran tata kelola dalam mengurangi praktik manajemen laba. Konflik terjadi antara pemilik dan manajer yang diperkuat dengan ketidakseimbangan informasi. Penerapan mekanisme pengendalian melalui tata kelola perusahaan dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan kedua pihak dan menekan terjadinya manajemen laba (El Diri *et al.*, 2020). Salah satu implementasi konsep tata kelola perusahaan yang baik dapat melalui praktik pengungkapan informasi. Perusahaan diharapkan mampu menyajikan informasi yang terbuka, akurat, tepat waktu, dan jelas, terutama yang berkaitan dengan kondisi perusahaan. Secara umum, peningkatan kualitas pengungkapan laporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi sehingga berpotensi menekan terjadinya konflik antara manajemen dan pemangku kepentingan (Kawulur *et al.*, 2023).

Berdasarkan pada hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 79,5% dari populasi masyarakat Indonesia. Hasil survey tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) direspon dengan mengeluarkan POJK No. 8 Tahun 2015 pada tanggal 26 Juni 2015 tentang situs *website* emiten. Peraturan tersebut mewajibkan emiten untuk pengungkapan *paper based* beralih menjadi pengungkapan berbasis *website*. Tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW) merupakan salah satu mekanisme penyampaian informasi keuangan dan non keuangan yang digunakan oleh entitas bisnis melalui situs web perusahaan (Hayati & Suprayogi, 2018). Pengungkapan informasi ini akan mengurangi ketidakseimbangan informasi antar berbagai pihak.

Pada tahun 2022, Rata-rata tingkat kinerja pengungkapan informasi korporasi melalui media *website* tercatat sebesar 53%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah maksimum item wajib yang seharusnya diungkapkan, yaitu sebesar 100% (Alvia *et al.*, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba akan cenderung membatasi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan guna menghindari kemudahan dalam pendeteksian tindakannya. Dugaan mengenai pengaruh tingkat pengungkapan informasi perusahaan terhadap praktik manajemen laba didukung studi yang dilakukan oleh Kirana *et al.* (2016); Gita *et al.* (2019); serta Halim *et al.* (2005) menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pengungkapan informasi korporasi, akan mengakibatkan besar peluang praktik manajemen laba. Namun demikian, temuan tersebut bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh Kawulur *et al.* (2023) dan Wisely & Karina (2022) bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak memiliki pengaruh pada berkurangnya aktivitas manajemen laba.

Salah satu cara lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan manajemen laba adalah struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, serta institusi lainnya (Rustan, 2023). Kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik karena investor institusi seperti pemerintah, perusahaan badan hukum, reksa dana, asuransi, dana pensiun punya sumber daya dan kemampuan lebih besar untuk memantau tindakan manajer (Cinthya *et al.*, 2022).

Berdasarkan data ICW (2022) bahwa terdapat 119 kasus korupsi BUMN dan menjadi lembaga yang dirugikan kedua setelah pemerintah (Oktavia *et al.*, 2023). Data tersebut menimbulkan gap karena BUMN pada dasarnya berada di bawah kendali negara dan memiliki struktur kepemilikan mayoritas oleh pemerintah. Kondisi tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang seharusnya lebih kuat dalam perusahaan milik negara. Fenomena ini menarik untuk diteliti, khususnya pada BUMN *Go Public* yang

memiliki keunikan bahwa pemegang mayoritas saham adalah kepemilikan negara dan institusi, sehingga efektivitas kepemilikan institusional dalam menekan manajemen laba dapat diteliti.

Tingginya tingkat kepemilikan institusional mampu menjadi mekanisme tata kelola eksternal efektif karena kemampuan dan insentif ekonomi yang kuat untuk memonitor manajer. Sebaliknya, semakin rendah proporsi kepemilikan institusional, semakin besar kecenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan laba. Pernyataan tersebut didukung dengan oleh Immanuel *et al.* (2022); Tifanny & Wijaya (2020); dan Agustin & Widiatmoko (2022) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wisely & Karina (2022) dan Cinthya *et al.* (2022) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Faktor lain yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Pada perusahaan BUMN umumnya memiliki aset miliaran rupiah dan memiliki keterlibatan terhadap proyek negara. Tuntutan tersebut menyebabkan tingginya kompleksitas, sorotan publik, dan tekanan kerja dari pemerintah. Kondisi ini meningkatkan peluang manajer melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik yang dilakukan berlebihan akan menimbulkan skandal keuangan yang merugikan pihak terkait. Hal ini sesuai dengan data CNBC (2019) bahwa sebagian besar perusahaan BUMN berukuran besar seperti PT PLN, PT Pertamina, dan PT Garuda terindikasi kasus skandal keuangan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dipilih karena menurut teori keagenan, ukuran perusahaan besar umumnya diikuti oleh meningkatnya asimetri informasi, sehingga memberikan peluang lebih besar terjadinya praktik manajemen laba. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joe & Ginting (2022), Agsari (2020), dan Faradhifa & Handayani (2024), menjelaskan ukuran perusahaan yang besar maka akan semakin besar juga melakukan manajemen laba. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Paramita & Idayati (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik manajemen laba.

Adanya inkonsistensi hasil studi sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba, menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang kemungkinan turut memengaruhi praktik tersebut. Salah satu faktornya yaitu profitabilitas, yang menjadi indikator evaluasi kerja dan kompensasi manajer dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan data Goodstats (2023) bahwa total laba bersih konsolidasi BUMN menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi, yaitu sebesar Rp124,99 triliun pada 2019, turun drastis menjadi Rp13,29 triliun pada 2020, kemudian meningkat kembali menjadi Rp124,71 triliun pada 2021 dan naik hingga sekitar Rp309 triliun pada 2022, kemudian menurun sebesar Rp183,9 triliun pada 2023. Kondisi fluktuasi tersebut diduga menjadi dorongan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik. Argumen tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwoto (2024), Fadhilah & Kartika (2022), Bintara (2020), dan Jeniffer & Sudirgo (2020) profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joe & Ginting (2022) dan Anindya *et al.* (2020) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian ini merujuk pada Wisely & Karina (2022) yang menguji pengaruh kualitas pengungkapan serta peran tata kelola perusahaan terhadap praktik manajemen laba. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel kualitas pengungkapan. Variabel pengungkapan dalam penelitian ini merujuk pada Alvia *et al.* (2024) yang menggunakan sub item berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015. Penelitian ini juga memiliki perbedaan pada tahun, objek penelitian, serta menambah variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Objek yang digunakan peneliti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada periode 2020-2024. Pemilihan objek ini dilatarbelakangi bahwa BUMN merupakan salah satu kelompok perusahaan yang paling banyak terlibat dalam kasus kecurangan keuangan yang mengakibatkan kerugian (ICW, 2022). BUMN memiliki tekanan politis dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba hingga manipulasi agar terlihat memenuhi ekspektasi publik dan regulator.



Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, fenomena terjadi, dan *research gap* yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini berjudul “**Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW), Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN Terdaftar BEI Periode 2020-2024).**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW) terhadap manajemen laba.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori keagenan yang menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW) dapat kepemilikan institusional dapat mengurangi

praktik manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu memotivasi praktik manajemen laba.

b. Manfaat Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW), kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan korporasi dalam mengungkapkan informasi korporasi berbasis *website* yang diwajibkan OJK dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan penerapan tata kelola perusahaan guna meminimalkan praktik manajemen laba.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap efektifitas penerapan POJK No. 8 Tahun 2015 dan penerapan tata kelola perusahaan. Penelitian ini dapat membantu regulator dalam merumuskan regulasi yang efektif untuk memperbaiki tata kelola perusahaan di Indonesia.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi pertimbangan investor dan calon investor dalam menilai kualitas dan prospek perusahaan sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak, yaitu prinsipal seperti pemegang saham atau investor, memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen (manajer), untuk menjalankan aktivitas perusahaan sekaligus diberi wewenang dalam pengambilan keputusan. Investor bertindak sebagai pemilik perusahaan, sedangkan manajer berperan sebagai agen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan (Renaldo *et al.*, 2022).

Hubungan keagenan pada dasarnya mencerminkan pemisahan antara kepemilikan dan kendali perusahaan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat memicu konflik kepentingan, karena manajemen sebagai agen memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan pemilik perusahaan (Maharany & Oktavia, 2024). Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk memantau dan mengendalikan tindakan manajer.

Permasalahan keagenan timbul ketika prinsipal mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa agen bertindak demi kepentingan dan kesejahteraan prinsipal. Manajer memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi menyeluruh mengenai potensi perusahaan, kondisi internal, dan lingkungan kerja, berbeda dengan pemilik yang memiliki keterbatasan dalam mengetahui kinerja manajer. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan perbedaan akses dan penerimaan

informasi antara pihak agen dan pemilik, yang dikenal sebagai asimetri informasi (Renaldo *et al.*, 2022).

Cara dalam mengurangi konflik keagenan diperlukan adanya keterbukaan informasi oleh manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan biaya agensi, yang meliputi biaya pengawasan, biaya audit, dan biaya kompensasi bagi agen. Pada praktiknya, sulit bagi perusahaan untuk mencapai *zero agency cost* karena perbedaan tujuan antara manajer dan investor cukup besar. Salah satu cara untuk menekan biaya agensi dan meminimalisasi asimetri informasi adalah dengan memberikan pengungkapan informasi yang lebih terbuka dan transparan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi korporasi yang dilakukan perusahaan, semakin terbatas kesempatan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan teori keagenan, salah satu mekanisme pengendalian eksternal yang relevan adalah tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Penyajian informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik memungkinkan investor serta pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan, sehingga peluang bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba menjadi semakin terbatas.

Selain pengungkapan informasi, adapun pentingnya keberadaan mekanisme monitoring dalam mengendalikan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang efektif, karena investor institusi umumnya memiliki kemampuan analitis, sumber daya yang memadai, serta kepentingan jangka panjang yang mendorong mereka untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan manajemen.

Di sisi lain, teori keagenan juga menilai ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik manajemen laba. Semakin besar ukuran

perusahaan, semakin kompleks aktivitas operasional dan struktur organisasinya. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan peluang terjadinya perilaku oportunistik seperti manajemen laba.

Manajemen laba juga terjadi karena laba menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan kinerja manajer. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan bagi manajer untuk memenuhi target laba atau menjaga tingkat profitabilitas, sehingga mendorong munculnya praktik manajemen laba demi mempertahankan citra kinerja perusahaan.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW)**

Menurut Hayati & Suprayogi (2018) tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* merupakan salah satu mekanisme yang umum digunakan oleh entitas bisnis. Informasi yang disampaikan meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan dan dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan. Menurut Xiao *et al.* (2002) bahwa praktik pelaporan keuangan melalui internet memberikan banyak keuntungan, seperti mendukung aktivitas pemasaran global, menekan biaya laporan berbentuk cetak, menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan luas, serta mempermudah interaksi dengan pemangku kepentingan secara global. Perusahaan yang menggunakan pelaporan keuangan melalui internet secara keseluruhan lebih besar dan lebih menguntungkan, dan saham mereka lebih aktif di bursa dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki praktik pelaporan tersebut (Pervan, 2005).

Pada konteks negara Indonesia, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi secara terbuka dan andal, terutama informasi yang relevan dan memengaruhi terhadap pengambilan keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan mencerminkan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang diterapkan secara

konsisten akan memperkuat tingkat kepercayaan investor, kreditor, dan mitra usaha terhadap perusahaan. Praktik ini juga mendukung kejelasan peran dan tanggung jawab dalam struktur organisasi internal, mendorong keseimbangan kekuasaan antar organ perusahaan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang akuntabel. Dalam konteks ini, penanda kualitas pengungkapan sendiri dikenal dengan istilah Tingkat pengungkapan informasi melalui *website* perusahaan (TPIKBW) digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi yang diterapkan oleh perusahaan (Dafitra & Alvia, 2023).

Pemberlakuan POJK Nomor 8 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk menyediakan sejumlah informasi melalui *website* resmi mereka. Informasi yang wajib diungkapkan mencakup informasi umum emiten, informasi yang dibutuhkan investor, aspek tata kelola perusahaan, serta informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada penelitian ini, TPIKBW diukur menggunakan indeks yang disusun oleh Alvia *et al.* (2024) berdasarkan 31 item informasi yang wajib diungkapkan sesuai dengan ketentuan POJK No. 8 Tahun 2015. Setiap item informasi yang disajikan oleh perusahaan di *website* akan diberikan skor 1, sedangkan yang tidak diungkapkan diberi skor 0. Nilai akhir dari indeks diperoleh dengan membagi total skor yang didapat perusahaan dengan jumlah maksimal skor yang mungkin diperoleh.

Menurut Alvia *et al.* (2024) terdapat empat motif utama yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi korporasi melalui *website*, yaitu:

1. Pada negara Indonesia pengungkapan informasi melalui *website* telah menjadi kewajiban (*mandatory disclosure*) berdasarkan ketentuan POJK No. 8 Tahun 2015.
2. Hasil studi empiris oleh Du & Jiang (2014) yang menunjukkan bahwa media sosial serta *website* perusahaan menjadi sarana utama yang digunakan oleh pengguna dalam memperoleh informasi korporasi, dengan tingkat preferensi yang berada pada rentang 72 hingga 89 persen.

3. Topik terkait pengungkapan informasi berbasis *website* masih jarang diteliti. Menurut Sheng (2017) bahwa hanya sekitar 10% dari total riset yang secara khusus membahas isu ini, sehingga membuka peluang untuk pengembangan kajian lebih lanjut.
4. Berdasarkan survei *Google Trends* tahun 2018, berdasarkan kategori pencarian *website* korporasi, tingkat akses pengguna terhadap situs web perusahaan di Indonesia menempati peringkat ke-9 secara global. Temuan ini mengindikasikan besarnya minat dan perhatian publik terhadap informasi perusahaan yang disediakan secara *online*. akses pengguna terhadap situs web perusahaan di Indonesia menempati peringkat ke-9 tertinggi di dunia dalam kategori pencarian terkait *website* korporasi.

**Tabel 2.1 Indikator Pengukuran Pengungkapan**

Rumus	Definisi Rumus	Sumber
Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (POJK No. 8 Tahun 2015)	$IPIK = \frac{\sum Skor\ yang\ diperoleh}{\sum Skor\ maksimal}$	(Alvia <i>et al.</i> , 2024)
Pengungkapan (POJK No. 43 Tahun 2020)	$IPIK = \frac{\sum Skor\ yang\ diperoleh}{\sum Skor\ maksimal}$	(Wisely & Karina, 2022)
<i>Internet Financial Reporting</i> (IFR)	IFR = Skor Konten + Skor Ketepatan Waktu + Skor Teknologi + Skor Dukungan Pengguna	(Almilia, 2009)

Sumber: Diolah oleh penulis

Ada banyak sekali indikator dalam mengukur tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Perbedaan indikator tersebut terletak pada ruang lingkup pengungkapan, dasar regulasi yang digunakan, dan tingkat subjektivitas penilaian. Oleh karena itu, indikator pengukuran yang dipilih perlu disesuaikan dengan karakteristik objek penelitian dan tujuan penelitian.

Pengukuran yang dikembangkan oleh Alvia *et al.* (2024) Pengukuran berbasis POJK No. 8 Tahun 2015 Indikator ini dinilai efektif karena seluruh perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi sesuai regulasi. Berdasarkan POJK terdapat 31 sub item pengungkapan yang terdiri aspek informasi umum, informasi untuk investor, informasi tata kelola, dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Kelebihan utama proksi ini adalah item pengungkapan yang wajib

diungkapkan sangat spesifik dan jelas sehingga proses penilaian menjadi lebih efektif karena peneliti hanya perlu menilai ketersediaan informasi. Proksi ini juga sangat cocok digunakan untuk semua jenis industri terdaftar BEI.

Pengukuran yang dikembangkan oleh Wisely & Karina (2022) menggunakan sub item pada POJK No 55 Tahun 2015 terdapat 79 item yang wajib diungkapkan. Peraturan ini digunakan sebagai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola bagi perusahaan publik yang memenuhi kriteria aset skala kecil dan skala menengah. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor manufaktur terdaftar BEI di Indonesia sedangkan penelitian ini objek yang dipilih ialah BUMN. Perusahaan BUMN merupakan perusahaan publik dan kriteria asetnya sudah masuk kategori besar sehingga proksi ini kurang cocok untuk diterapkan pada sampel penelitian.

Pengukuran yang dikembangkan oleh Almilia (2009) untuk mengukur kualitas *Internet Financial Reporting* (IFR), menekankan pada aspek teknologi *website*, seperti format penyajian, kemudahan akses, dan fitur pendukung. Kelemahan utama pengukuran ini adalah kurangnya penekanan pada isi informasi. Perusahaan yang telah mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap namun masih menggunakan format PDF dapat memperoleh skor rendah, meskipun informasinya sama dengan perusahaan yang menyajikan laporan dalam format HTML. Sistem penilaian IFR bergantung pada peneliti dan cenderung menguntungkan perusahaan besar yang memiliki infrastruktur teknologi *website* lebih maju. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan *website* sederhana berpotensi memperoleh skor rendah meskipun telah memenuhi kewajiban pengungkapan informasi yang cukup. Proksi ini dikembangkan saat informasi pengungkapan berbasis *website* masih bersifat sukarela.

Berdasarkan penjelasan indikator diatas, peneliti menggunakan proksi TPIKBW yang dikembangkan oleh Alvia *et al.* (2024) karena landasan peraturan yang digunakan POJK No.8 Tahun 2015 menjadi kewajiban seluruh perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN, untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan di *website* perusahaan. Proksi ini memastikan hasil penelitian lebih valid dan sesuai dengan karakteristik perusahaan.



### 2.2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2015`

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya POJK yang tertuang dalam Keputusan Ketua OJK Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten, atau Perusahaan Publik Situs Web Emiten, berlaku pada tanggal 26 Juni 2015, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2016. POJK ini terdiri dari 16 paragraf yang mencakup tiga hal utama berikut poin: 1. Ketentuan umum; 2. Informasi yang wajib tersedia pada *website* perusahaan; 3. Ketentuan sanksi; dan 4. Ketentuan peralihan. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, semua perusahaan publik diwajibkan untuk memberikan informasi tentang dirinya secara *online*.

POJK Nomor 8 Tahun 2015 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai respon terhadap pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia, khususnya terkait media yang memberikan informasi ke situs web. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi. Emiten perlu menyampaikan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut POJK, Pasal 1 definisi situs web adalah sekumpulan halaman web yang berisi data atau informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet, dan Pasal 2 menetapkan bahwa perusahaan harus memiliki situs web. Adapun untuk meningkatkan transparansi, informasi yang harus dimuat di situs web emiten atau perusahaan publik, seperti yang dinyatakan 5 POJK No. 8 Tahun 2015, paling kurang harus mencakup:

**Tabel 2.2 Sub Item Pengungkapan POJK No. 8 Tahun 2015**

Jenis Informasi	Item/Sub Item Pengungkapan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015
Informasi Umum emiten (Pasal 7)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama, alamat, kontak kantor pusat, serta alamat pabrik (jika ada)</li> <li>2. Riwayat singkat emiten dan struktur organisasi</li> <li>3. Struktur kepemilikan emiten</li> <li>4. Struktur grup emiten dalam bentuk bagan</li> <li>5. Profil direksi, dewan komisaris, komite, dan sekretaris perusahaan</li> <li>6. Dokumen anggaran dasar</li> </ol>

Jenis Informasi	Item/Sub Item Pengungkapan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015
Informasi Untuk Investor (Pasal 8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prospektus penawaran umum</li> <li>2. Laporan tahunan untuk 5 tahun terakhir</li> <li>3. Informasi keuangan</li> <li>4. Informasi RUPS</li> <li>5. Informasi saham</li> <li>6. Informasi obligasi</li> <li>7. Informasi dividen</li> <li>8. Informasi mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten</li> <li>9. Informasi atau fakta material</li> </ol>
Informasi Tata Kelola Perusahaan (Pasal 9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman kerja direksi serta dewan komisaris</li> <li>2. Pengangkatan, pemberhentian, atau kekosongan sekretaris perusahaan</li> <li>3. Piagam unit audit internal</li> <li>4. Kode etik emiten</li> <li>5. Pedoman kerja komite</li> <li>6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit</li> <li>7. Prosedur nominasi dan remunerasi</li> <li>8. Kebijakan manajemen risiko</li> <li>9. Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran</li> <li>10. Kebijakan anti korupsi</li> <li>11. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur</li> <li>12. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor</li> </ol>
Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Pasal 10)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait lingkungan hidup</li> <li>2. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait ketenagakerjaan</li> <li>3. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan</li> <li>4. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait tanggung jawab produk dan jasa</li> </ol>

Sumber: POJK (2015)

Berdasarkan peraturan tersebut, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Bentuk sanksi tersebut antara lain berupa peringatan tertulis, pengenaan denda, pembatasan maupun pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, serta pembatalan persetujuan dan pendaftaran.

### 2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh organisasi atau institusi, baik di dalam maupun luar negeri, seperti bank, perusahaan asuransi, pemerintah dan perusahaan badan hukum (Singal & Putra, 2019). Kepemilikan institusional berfungsi sebagai cara untuk mengendalikan manajer, memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik para pemegang saham, dan membantu mengurangi konflik keagenan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi memungkinkan adanya pengawasan yang efektif terhadap manajer, sehingga dapat mencegah perilaku oportunistik dan penyelewengan yang merugikan nilai perusahaan (Utari & Sari, 2016). Menurut Indahningrum & Handayani (2009) kepemilikan institusional juga dapat menurunkan penggunaan utang untuk mengurangi biaya keagenan. Selain itu, investor institusional dinilai lebih mampu memanfaatkan informasi laba saat ini untuk memprediksi laba masa depan, dan memiliki kekuatan dalam memengaruhi perusahaan melalui opini publik.

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh investor non-manajerial yang tidak memiliki keterkaitan langsung atau hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan ini menunjukkan seberapa besar saham perusahaan dimiliki oleh masyarakat umum. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan (Suchman, 1995). Kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan dan sadar oleh informasi anomali akibat praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan institusi memiliki sumber daya dan insentif, berupa kemampuan analitis keuangan dan memiliki akses informasi yang cepat atas suatu peristiwa. Kelebihan investor institusi tersebut dapat membantu pengawasan terhadap perilaku manajer (Ramalingegowda *et al.*, 2020).

Adanya pengawasan oleh pihak institusi akan membuat manajer merasa diawasi dan dituntut untuk menyampaikan laporan secara terbuka dan transparan. Kehadiran institusi menjadi tekanan manajer untuk tidak melakukan praktik oportunistik karena adanya peluang mudah dideteksi oleh investor institusi

(Rachmawati & Triatmoko, 2007). Adapun pilihan proksi untuk mengukur kepemilikan saham oleh institusi dijelaskan pada tabel 2.3.

**Tabel 2. 3 Indikator Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Rumus	Definisi Rumus	Sumber
Kepemilikan Institusional	$KI = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham beredar}}$	(Bushee, 1998)
Kepemilikan Institusional	1 jika institusi memiliki $\geq 5\%$ saham dan 0 jika kurang dari 5% saham	(Ge <i>et al.</i> , 2021)

Sumber: Data diolah oleh penulis

Ada beberapa indikator dalam pengukuran kepemilikan institusional, yaitu membagi jumlah kepemilikan saham institusi dengan total saham beredar dan menggunakan variabel *dummy* yang memberikan nilai 1 pada kepemilikan yang dimiliki institusi diatas 5%. Ukuran kepemilikan institusional berdasarkan persentase saham seperti yang dikembangkan Bushee (1998) lebih unggul dibandingkan ukuran *dummy* dari Ge *et al.* (2021). Pengukuran Bushee (1998) menghasilkan data dalam bentuk persentase sehingga mampu menunjukkan variasi tingkat kepemilikan institusi secara lebih akurat, misalnya perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional 8%, 25%, atau 45% akan terlihat berbeda pengaruhnya.

Proksi Ge *et al.* (2021) oleh ukuran *dummy* hanya mengelompokkan perusahaan menjadi 1 jika kepemilikan institusional  $\geq 5\%$  dan 0 jika di bawah 5%, sehingga perusahaan dengan perbedaan kekuatan pengawasan yang sangat besar tetap masuk kategori yang sama. Kepemilikan saham institusi 5% akan sama dengan institusi yang memiliki kepemilikan 60%.

Penelitian ini menggunakan proksi yang dikembangkan oleh Bushee (1998). Hal ini didasarkan bahwa proksi ini memiliki kelebihan, yaitu dapat melihat variasi tingkat kepemilikan institusi yang dimiliki masing-masing perusahaan. Di sisi lain proksi menggunakan variabel *dummy*, tidak melihat tingkat kepemilikan hanya membagi berdasarkan kategori. Proksi *dummy* ini masuk dalam pengukuran non-paramterik yang mana tipe pengukuran ini tidak memiliki nilai yang kuat dibandingkan pengukuran parametrik (Hartono, 2021).

#### 2.2.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2001) dalam Rahmawati *et al.* (2022) ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya perusahaan yang mencerminkan skala operasional, yang biasa diukur berdasarkan total aset, total pendapatan, atau total ekuitas. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam hal modal dan operasional. Pengklasifikasian ukuran perusahaan ini berguna bagi investor dalam membuat keputusan investasi seperti menilai risiko, memperkirakan potensi, dan membandingkan kinerja antar perusahaan (Ibrahim, 2008). Menurut Hartono (2019) ukuran perusahaan adalah besar tidaknya suatu usaha yang ditentukan oleh nilai logaritma total aset dibagi dengan besar kecilnya aset perusahaan.

Pada penelitian ini total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan tujuan mengurangi tingkat fluktuasi data yang terlalu besar. Penggunaan total aset secara langsung dapat menghasilkan nilai variabel yang sangat tinggi, bahkan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan data tanpa mengubah proporsi nilai sebenarnya, total aset ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, perusahaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama.

1. Usaha kecil

Perusahaan ini memiliki total aset maksimal sebesar Rp 20 miliar, tidak termasuk afiliasi atau berada di bawah kendali perusahaan lain yang bukan usaha kecil atau menengah, serta tidak termasuk dalam bentuk reksadana.

2. Usaha besar

kegiatan ekonomi yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan tertentu. Kategori ini mencakup usaha nasional, baik milik negara maupun swasta, serta usaha asing yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada umumnya memiliki total aset yang besar dan cakupan operasional yang luas, sehingga menghadapi tingkat kompleksitas dan sorotan publik yang tinggi. Kompleksitas tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam proses pengawasan oleh pemilik modal dan pemangku kepentingan. Kondisi ini memungkinkan manajer memiliki ruang untuk melakukan pengaturan laba dalam pelaporan keuangan. Adapun banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan. Indikator tersebut disebutkan pada tabel 2.4

**Tabel 2. 4 Indikator Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Rumus	Definisi Rumus	Sumber
Total Aset	$\ln(\text{Total Aset})$	(Machfoedz, 1994)
Total Karyawan	Jumlah tenaga kerja	(Catherine & Morrison, 2006)

Sumber: Diolah oleh penulis

Proksi ukuran perusahaan yang digunakan adalah  $\ln(\text{Total aset})$ . Proksi ini dipilih karena menunjukkan besarnya kekayaan, sumber daya, dan kemampuan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Semakin besar aset, semakin tinggi tuntutan untuk mengelola aset tersebut dengan efektif. Sedangkan proksi pengukuran jumlah tenaga kerja hanya menunjukkan aspek jumlah karyawan, tetapi tidak menunjukkan kemampuan perusahaan secara keuangan.

## 2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya terkait kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Menurut Kasmir (2019) bahwa profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk modal, aset, dan tenaga kerja. Menurut Brigham dan Houston (2019) menyatakan bahwa profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemilik modal.

Menurut Widnyana *et al.* (2025) profitabilitas tidak hanya menitikberatkan pada besarnya laba yang dihasilkan, tetapi juga pada efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, profitabilitas

menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis, kebijakan operasional, serta keputusan investasi perusahaan. Profitabilitas memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan laba semata. Laba hanya menunjukkan selisih antara pendapatan dan biaya dalam satu periode akuntansi, sedangkan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, dua perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang sama, namun perusahaan yang lebih efisien dalam pemanfaatan aset akan memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi.

Menurut Thian (2022) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya seperti penjualan, pemakaian aset, dan penggunaan modal untuk menghasilkan laba. Rasio profitabilitas ini dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat kinerja manajer dalam mengelola perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan akun di laporan laba rugi dan laporan neraca. Hal ini dilakukan guna mengetahui profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu sehingga membantu perusahaan mengambil keputusan ataupun perbaikan.

Alat ukur profitabilitas umumnya menggunakan indikator seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki, sedangkan ROE menggambarkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Keunikan penggunaan rasio profitabilitas ini, khususnya dalam konteks industri, adalah bahwa nilai ROA dan ROE tidak hanya menunjukkan kinerja internal perusahaan, tetapi juga mencerminkan daya tarik bisnis (*business attractiveness*) suatu industri, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi pertumbuhan perusahaan.

Menurut pengukuran profitabilitas dilakukan untuk mendukung berbagai kepentingan strategis perusahaan, antara lain:

1. Menilai sejauh mana efektivitas manajemen dalam mengelola aset, modal, serta biaya operasional guna mencapai tingkat laba yang maksimal.

2. Dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi, mengingat investor umumnya lebih tertarik pada perusahaan yang mampu menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi dan konsisten.
3. Menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha serta mempertahankan daya saingnya dalam jangka panjang.
4. Menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja saham di pasar modal, yang umumnya diukur melalui rasio keuangan seperti *Earnings per Share* (EPS), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).
5. Mencerminkan tingkat keberlanjutan perusahaan, di mana profitabilitas yang stabil menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Menurut Gunawan *et al.* (2015) dalam Saniamisha & Jin (2019) tingkat profitabilitas dapat memengaruhi perilaku manajer untuk melakukan tindakan oportunistik. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba guna mempertahankan citra kinerja yang baik di mata investor dan pemangku kepentingan. Menurut Oktavia *et al.* (2023) bahwa ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya perusahaan berhasil mencatat laba yang tinggi, sehingga muncul ekspektasi agar kinerja tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada periode berikutnya. Ekspektasi tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi manajer untuk terus menunjukkan ROA yang baik dari waktu ke waktu. Tekanan ini akan semakin besar ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, sehingga dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik.

Adapun indikator pengukuran profitabilitas dapat dilihat pada tabel 2.5

**Tabel 2. 5 Indikator Pengukuran Profitabilitas**

Rumus	Definisi Rumus	Sumber
ROA	Total Laba / Total Aset	(Rahmawati <i>et al.</i> , 2022)
ROE	Total Laba / Total Ekuitas	(Rahmawati <i>et al.</i> , 2022)
Profit Margin	Laba bersih / Penjualan	(Fahmi, 2011)

Sumber: Diolah oleh penulis



Penelitian ini menggunakan ROA sebagai pengukuran profitabilitas. ROA dipilih karena menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Sedangkan ROE hanya fokus pada laba yang diperoleh pemegang saham/aset, sehingga tidak memperhitungkan bagaimana aset perusahaan dikelola secara keseluruhan. Di sisi lain profit Margin hanya melihat laba bersih dibanding penjualan. Oleh karena itu, proksi ROA bisa menilai kinerja manajemen dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, baik modal maupun aset tetap, sehingga lebih tepat untuk dianalisis hubungannya dengan praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan manajer sering mengatur laba berdasarkan keseluruhan kapasitas aset perusahaan.

## **2.2.6 Manajemen Laba**

### **2.2.6.1 Definisi Manajemen Laba**

Manajemen laba merupakan manipulasi variabel akuntansi atau melakukan tindakan nyata tertentu guna mencapai tujuan laba yang dilaporkan secara spesifik (Scott, 2015). Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Pilihan kebijakan akuntansi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, pemilihan metode akuntansi tertentu yang diizinkan dalam standar akuntansi. Kedua, penggunaan akrual diskresioner, seperti penentuan cadangan kerugian kredit, biaya garansi, penilaian persediaan, serta penentuan waktu dan jumlah penghapusan untuk *pos non-recurring* dan *extraordinary item*, termasuk biaya yang berkaitan dengan proses reorganisasi perusahaan (Dewi *et al.*, 2024).

Menurut Scott (2015) manajemen laba dapat dipahami melalui dua perspektif utama, yaitu perspektif kontrak dan perspektif pelaporan. Berdasarkan perspektif kontrak, manajemen laba dipandang sebagai sarana yang digunakan manajer untuk melindungi perusahaan dari dampak kondisi ekonomi atau kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Pada praktiknya, kontrak antara perusahaan dengan pihak lain, seperti kreditur atau pemegang saham, sering kali bersifat kaku dan sulit disesuaikan ketika terjadi kondisi yang tidak terduga. Oleh karena itu, manajemen laba dapat digunakan untuk mengurangi risiko pelanggaran kontrak

atau konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan dalam kontrak tersebut.

Berdasarkan perspektif pelaporan, manajemen laba digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga stabilitas pertumbuhan laba dari satu periode ke periode berikutnya. Laba yang stabil dianggap dapat memberikan sinyal positif kepada pasar dan meningkatkan nilai pasar saham perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen laba dapat berperan sebagai alat komunikasi manajemen kepada investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan.

Pada nyatanya manajemen laba tidak selalu dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Di sisi lain, manajer juga dapat melakukan manajemen laba secara oportunistik demi kepentingan pribadinya. Dari perspektif kontrak, tindakan ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan manajemen sendiri, sementara biaya atau risiko dari tindakan tersebut ditanggung oleh pihak lain yang terikat kontrak dengan perusahaan. Dari perspektif pelaporan, praktik oportunistik ini dapat dilakukan dengan mencatat penghapusan aset dalam jumlah yang lebih besar dari seharusnya atau dengan menggunakan ukuran laba selain laba bersih, seperti laba pro forma. Akibat dari manajemen laba yang berlebihan, laba yang dilaporkan dapat menjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga tingkat keandalan dan kredibilitas laporan keuangan menurun.

Manajer sebagai *agent* memiliki kepentingan yang besar terhadap laba yang dilaporkan perusahaan. Mengingat adanya berbagai pilihan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dalam standar akuntansi, seperti *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), manajer cenderung memilih kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan tertentu. Selain melalui pemilihan kebijakan akuntansi, manajer juga dapat melakukan tindakan operasional yang berdampak pada laba, seperti pengurangan biaya penelitian dan pengembangan (*research and development*). Pilihan-pilihan tersebut dapat didorong oleh pertimbangan efisiensi maupun oleh kepentingan oportunistik manajemen. Tindakan memanipulasi pelaporan akuntansi untuk mencapai tujuan selain penyajian laporan keuangan yang andal dan konsisten disebut sebagai manajemen laba (Scott, 2015). .

Menurut Renaldo *et al.* (2022) dalam buku “Manajemen Laba: Teori dan Pembuktian” Adapun peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Metode Akuntansi

Penerapan metode akuntansi memungkinkan manajemen memilih perlakuan pencatatan yang berbeda terhadap suatu kejadian, sekaligus melibatkan pertimbangan subjektif dalam menentukan estimasi akuntansi.

2. Informasi Asimetri

Ketidakseimbangan informasi muncul ketika manajemen menguasai informasi yang lebih banyak daripada pihak eksternal, yang menyebabkan keterbatasan bagi pihak luar dalam memantau tindakan dan keputusan manajerial secara menyeluruh.

#### **2.1.6.2 Tujuan Manajemen Laba**

Adapun terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik manajemen laba, yaitu:

1. Skema Bonus

Perusahaan yang menerapkan sistem kompensasi berbasis bonus, manajer cenderung terdorong untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Skema kompensasi tersebut biasanya menggunakan ukuran akuntansi, seperti laba, dengan ketentuan ambang batas tertentu. Apabila target laba tercapai, manajer berhak menerima bonus. Kompensasi manajerial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kas, saham atau opsi saham, serta fasilitas pendukung lainnya. Laba perusahaan sering dijadikan sebagai ukuran utama dalam menilai kinerja dan menentukan besaran bonus yang diterima oleh CEO.

2. Kontrak Utang Jangka Panjang

Motivasi ini konsisten dengan hipotesis perjanjian utang dalam teori akuntansi positif, yang menjelaskan bahwa perusahaan yang mendekati batas perjanjian utang cenderung melakukan percepatan pengakuan laba agar terhindar dari potensi pelanggaran kontrak.

### 3. Motivasi Politik

Pada konteks hipotesis biaya politik, perusahaan berukuran besar berpotensi mengurangi laba yang dilaporkan guna menurunkan sorotan publik dan tekanan regulasi. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah, termasuk subsidi maupun perlindungan terhadap kompetitor asing.

### 4. Motivasi Perpajakan

Pertimbangan perpajakan menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, di mana manajemen berupaya mengurangi laba yang dilaporkan guna menekan kewajiban pajak perusahaan.

### 5. Pergantian CEO

CEO memiliki dorongan untuk meningkatkan laba perusahaan saat menjelang berakhirnya masa kerja atau pensiun, agar memperoleh kompensasi yang optimal. Di sisi lain, CEO yang menghadapi penilaian kinerja yang rendah berpotensi melakukan peningkatan laba yang dilaporkan sebagai upaya memperbaiki reputasi dan mempertahankan posisinya.

### 6. Penawaran Umum Perdana (IPO)

Saat perusahaan ingin melakukan *go public*, informasi keuangan memiliki peran penting sebagai sinyal yang mencerminkan nilai perusahaan kepada calon investor. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan agar dapat menarik minat investor.

### 7. Dampak Harga Saham

Upaya peningkatan laba yang dilaporkan sering dilakukan perusahaan untuk memengaruhi harga saham. Di sisi lain, praktik perataan laba digunakan manajer untuk menekan persepsi risiko pasar dan menurunkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan.

### 2.1.6.3 Bentuk Manajemen Laba

Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan manajer dalam melakukan manajemen laba (Scott, 2015a):

1. *Taking a Bath*

Bentuk ini oleh manajemen digunakan ketika menghadapi kondisi merugikan perusahaan akan mengakui rugi periode berjalan dan rugi yang akan datang agar laba di periode selanjutnya akan meningkat.

2. *Income Minimization*

Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung menghadapi tekanan politik yang lebih besar. Oleh karena itu, manajemen dapat melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi, seperti meningkatkan pengeluaran iklan atau penelitian, guna menurunkan laba yang dilaporkan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pajak serta menekan biaya modal yang ditanggung perusahaan.

3. *Income Maximization*

Perusahaan melakukan maksimalisasikan keuntungan untuk mencapai bonus atau menghindari pelanggaran kontrak. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian investor seperti penerbitan saham baru dan pembagian dividen

4. *Income Smoothing*

Perataan laba merupakan salah satu bentuk praktik manajemen laba yang paling umum dilakukan oleh manajemen. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan tampak lebih stabil dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur manajemen laba sebagai berikut:

**Tabel 2. 6 Indikator Pengukuran Manajemen Laba**

Rumus	Perhitungan	Sumber
Model Jones	$NDA = a1 \frac{1}{A_{it} - 1} + a2 (\Delta Rev) + a3(PPE)$	(Jones, 1991)
Model Modified Jones	$NDA = a1 \frac{1}{A_{it} - 1} + a2 (\Delta Rev - \Delta Rec) + a3(PPE)$	(Dechow <i>et al.</i> , 1995)
Model Healy	$NDA = \frac{\sum TA}{T}$	(Healy, 1985)
Model De Angelo	$NDA_t = TA_{t-1}$	(De Angelo, 1986)
Model Industri	$NDA = Y1_t + Y2_t \text{ Median}_t(TA_t)$	(Dechow & Sloan, 1991)

Sumber: Diolah oleh penulis

Ada banyak sekali indikator yang digunakan dalam menghitung manajemen laba. Menurut Dechow *et al.* (1995) setiap pengukuran memiliki keterbatasan sehingga perlu memilih model yang lebih akurat dan tidak bias. Pada Model Healy mengukur manajemen laba dengan mengasumsikan bahwa akrual yang wajar cenderung stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, akrual normal diperkirakan menggunakan rata-rata akrual pada beberapa tahun sebelumnya. Kelemahan utama model ini adalah tidak mempertimbangkan perubahan kondisi perusahaan, seperti peningkatan penjualan atau perubahan investasi aset. Kondisi tersebut menyebabkan apabila perusahaan mengalami pertumbuhan atau penurunan kinerja karena kegiatan normal perusahaan, maka perubahan akrual tersebut berpotensi keliru dan dianggap sebagai praktik manajemen laba.

Model DeAngelo mengasumsikan bahwa akrual normal pada suatu periode kurang lebih sama dengan akrual pada periode sebelumnya. Hal ini berarti, setiap perubahan akrual dianggap menunjukkan adanya campur tangan manajemen. Kelemahan model ini terletak pada asumsinya yang terlalu sederhana karena dalam praktiknya perubahan akrual juga dapat terjadi secara normal akibat perubahan aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, model ini kurang tepat digunakan pada perusahaan yang mengalami pertumbuhan atau fluktuasi kinerja.

Model Jones dikembangkan untuk mengatasi kelemahan model sebelumnya dengan memasukkan faktor ekonomi perusahaan seperti perubahan penjualan dan aset tetap. Model ini mengakui bahwa ketika penjualan meningkat atau aset tetap bertambah, maka akrual juga akan berubah dengan wajar. Namun, kekurangan Model Jones adalah menganggap seluruh perubahan penjualan sebagai sesuatu yang wajar. Padahal bisa saja penjualan kredit dan piutang usaha dapat digunakan untuk menaikkan laba tanpa dibarengi peningkatan kas. Oleh karena itu, kelemahan Model Jones menganggap manipulasi pendapatan sebagai akrual normal.

Model Industri mengasumsikan akrual suatu perusahaan dapat dikatakan normal dengan membandingkannya dengan akrual perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Model ini beranggapan bahwa perusahaan yang bergerak dalam satu industri menghadapi kondisi usaha yang relatif serupa, sehingga pola akrualnya juga dianggap mirip. Namun, model ini memiliki kelemahan karena setiap perusahaan tetap memiliki karakteristik yang berbeda, seperti ukuran perusahaan, cara pengelolaan usaha, dan tingkat efisiensi operasional. Selain itu, apabila banyak perusahaan dalam satu industri secara bersamaan melakukan manajemen laba, maka rata-rata industri tidak lagi mencerminkan kondisi yang normal. Oleh karena itu, model ini menjadi kurang efektif dalam mendeteksi praktik manajemen laba.

Model Modified Jones dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan Model Jones, terutama terkait manipulasi pendapatan berbasis penjualan kredit. Model ini memodifikasi pengukuran perubahan pendapatan dengan mengurangi perubahan piutang, atas asumsi bahwa kenaikan pendapatan yang diikuti oleh peningkatan piutang cenderung mengandung unsur *discretionary*. Oleh karena itu, Model Modified Jones bertujuan untuk mengurangi bias pengukuran akrual non-diskresioner yang timbul akibat manipulasi pendapatan berbasis kredit, sehingga mampu menilai *discretionary accruals* secara lebih akurat.

Berdasarkan perbandingan terhadap berbagai model pengukuran manajemen laba, penelitian ini memilih Model Modified Jones sebagai indikator pengukuran manajemen laba. Pemilihan ini didasarkan karena Model Modified Jones

kehadirannya ada untuk mengatasi kelemahan utama Model Jones, yaitu mengklasifikasikan manipulasi pendapatan sebagai akrual non-diskresioner. Hasil uji yang dilakukan oleh Dechow *et al.* (1995) menunjukkan secara empiris bahwa Model Modified Jones memiliki kekuatan pengujian yang lebih tinggi dibandingkan Model Healy, Model DeAngelo, Model Jones, dan Model Industri dalam mendeteksi praktik manajemen laba berbasis akrual. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa modified jones lebih *powerfull* dalam mendeteksi manajemen laba (Dewi *et al.*, 2024).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7 menyajikan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1	(Alvia <i>et al.</i> , 2024)	Analisis Konten Website terhadap Pengungkapan Informasi pada Perusahaan Go Public.	Perusahaan Go Public	Hasil Tingkat pengungkapan informasi di website 9 sektor industri Indonesia 2022 masih rendah, hanya 53%.
2	(Kawulur <i>et al.</i> , 2023)	Y: Manajemen Laba X1: Pengungkapan Laporan Keuangan	Perusahaan manufaktur tercatat BEI tahun 2018-2020	Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3	(Davis & Cestona, 2023)	Y: <i>Earning Surprise</i> Y: Manajemen Laba X: Kepemilikan Institusional	Perusahaan Publik AS tahun 1981-2019	Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>earning surprise</i> dan manajemen laba akrual, dan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba aktivitas riil
4	(Wisely & Karina, 2022)	Y:Manajemen Laba X1: Kepemilikan manajerial, X2: Kepemilikan Institusional,	Perusahaan non-keuangan tercatat di BEI tahun 2017-2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, institusional, dan <i>blockholder</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sementara



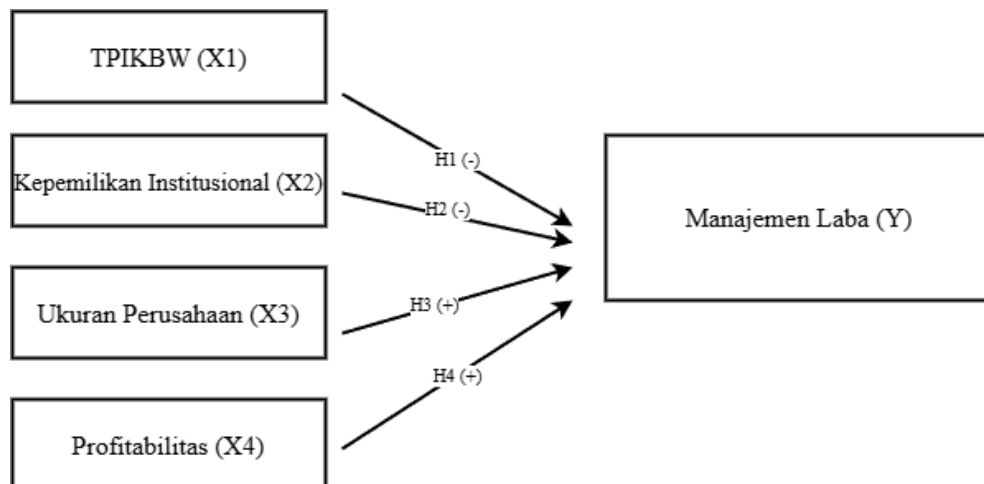
No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
		X3: <i>Blockholder</i> , X4: Kualitas pengungkapan, X5: Dewan komisaris, X6: Komite Audit.		faktor lainnya tidak berpengaruh.
5	(Putri & Naibaho, 2022)	Y: Manajemen Laba X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Cash Holding</i> X3: Profitabilitas Z: Internal Control	Perusahaan <i>consumer</i> terdaftar di S&P Capital IQ ASEAN Tahun 2016-2020	<i>Financial distress</i> dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan <i>cash holding</i> berpengaruh negatif. Selain itu, pengendalian internal sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh hubungan tersebut.
6	(Lestiwati & Trisnawati, 2022)	Y: Manajemen Laba X1: Leverage X2: Kepemilikan Institusional X3: Profitabilitas X4: Komisaris Independen	Perusahaan Manufaktur BEI tahun 2018-2020	Hasil menunjukkan semua variabel berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun, komisaris independen berpengaruh negatif.
7	(Joe & Ginting, 2022)	Y: Manajemen Laba X1: Ukuran Perusahaan X2: Leverage X3: Profitabilitas	Perusahaan Manufaktur 2017-2020	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan <i>leverage</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh.
8	(Burhan & Malau, 2021)	Y: Perataan Laba X1: Kepemilikan Institusional X2: Ukuran Perusahaan X3: Umur Perusahaan	Perusahaan BUMN terdaftar BEI tahun 2017-2019	Hasil menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan umur perusahaan tidak berpengaruh.
9	(Paramita & Idayati, 2020)	Y: Manajemen Laba X1: Profitabilitas X2: Likuiditas X3: Ukuran Perusahaan	Perusahaan Property dan <i>Real Estate</i> tahun 2015-2018	Profitabilitas berpengaruh positif, likuiditas berpengaruh negatif, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
10	(Kablan, 2020)	Y: Manajemen Laba X: Struktur Kepemilikan	Seluruh perusahaan terdaftar <i>Libyan Stock Market</i>	Kepemilikan manajerial, institusional, dan asing berpengaruh positif, kepemilikan publik berpengaruh negatif, sedangkan pemegang

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
			tahun 2010-2014	saham besar tidak berpengaruh.
11	(Agsari, 2020)	Y: Manajemen Laba X1: Kepemilikan Manajerial X2: Profitabilitas X3: Solvabilitas X4: Ukuran Perusahaan	Perusahaan Property dan <i>Real Estate</i> tahun 2013-2017	Kepemilikan manajerial, solvabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif.

Sumber: Diolah peneliti

## 2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu, maka diperoleh kerangka penelitian yang disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW) terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan menjelaskan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena manajemen tidak selalu bertindak sejalan dengan tujuan pemilik (Maharany & Oktavia, 2024). Manajer sebagai agen memiliki informasi dan akses yang lebih banyak mengenai potensi perusahaan, kondisi internal, dan lingkungan kerja, dibandingkan prinsipal yang memiliki keterbatasan informasi. Perbedaan

informasi yang diterima ini dikenal dengan asimetris informasi. Asimetris informasi memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan praktik yang menguntungkan dirinya sendiri. Manajer dituntut untuk memberikan hasil kinerja yang menguntungkan bagi pemangku kepentingan. Manajer akan memanfaatkan asimetris informasi untuk menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan prinsipal merasa diuntungkan. Praktik tersebut dikenal dengan manajemen laba (Renaldo *et al.*, 2022).

Salah satu cara manajer dapat melakukan praktik manajemen laba, yaitu dengan menyembunyikan informasi yang terjadi. Manajer yang melakukan praktik manajemen laba akan cenderung menutupi informasi agar tindakannya tidak mudah terdeteksi. Hal ini menyebabkan pemangku kepentingan tidak memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kondisi perusahaan. Pengungkapan menjadi salah satu bentuk keterbukaannya informasi yang dilakukan manajer. Berdasarkan teori keagenan, untuk mengurangi konflik pihak manajer dan pemangku kepentingan, dibutuhkan keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi dan laporan pertanggung jawaban kepada pemilik saham (Saghafi, 2016).

Penerapan TPIKBW yang diwajibkan melalui POJK No. 8 Tahun 2015 pada dasarnya digunakan untuk mekanisme transparansi. Kewajiban pengungkapan TPIKBW mempersempit ruang terjadinya asimetri informasi tersebut karena perusahaan harus menyajikan informasi secara melalui *website*, tidak hanya informasi keuangan seperti yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi juga berbagai informasi non keuangan. Secara teknis, penerapan TPIKBW memperluas ruang lingkup keterbukaan informasi perusahaan sehingga pemegang saham dan publik dapat mengetahui informasi perusahaan lebih banyak. Misalnya, pada salah satu item laporan tahunan yang apabila diungkapkan lebih rinci mengenai pos-pos laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan keuangan, estimasi manajer mengenai risiko, dan lain sebagainya. Jika informasi tersebut dijelaskan maka investor dapat mengetahui bagaimana laba disusun dan mampu mengetahui gambaran kinerja perusahaan lebih baik. Kelengkapan data tersebut mampu mempermudah investor dalam menilai dan membandingkan informasi perusahaan untuk mengambil keputusan.

Penilaian keterbukaan perusahaan berdasarkan POJK tersebut, maka dapat diukur dari tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW). Menurut Hayati & Suprayogi (2018) tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* merupakan salah satu mekanisme yang umum digunakan oleh entitas bisnis. Informasi yang disampaikan meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan dan dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan maka menunjukkan semakin baik keterbukaan perusahaan. TPIKBW dapat berperan dalam memberikan gambaran seberapa transparan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan material kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi acuan bagi investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat keputusan ekonomik. Semakin tinggi skor TPIKBW yang dimiliki perusahaan, semakin rendah tingkat asimetri informasi dan semakin membantu investor dalam mendeteksi praktik manajemen laba (Alzoubi, 2016). Tingginya skor TPIKBW yang dimiliki perusahaan juga menandakan bertanggungjawabnya perusahaan dalam melaporkan informasi yang terjadi dalam perusahaan.

Apabila praktik TPIKBW dimaksimalkan dan informasi yang disampaikan berkualitas serta relevan. Kondisi ini mengurangi peluang manajer untuk melakukan manipulasi laba karena setiap perubahan atau inkonsistensi informasi dapat segera terdeteksi oleh publik. Oleh karena itu, secara teoritis dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat TPIKBW, semakin rendah tingkat praktik manajemen laba dalam perusahaan. Hipotesis ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan bahwa mekanisme transparansi berfungsi sebagai alat pengendalian untuk menekan perilaku oportunistik manajemen.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oleh Gita *et al.* (2019); Saghafi (2016); Halim *et al.* (2005); dan Kirana *et al.* (2016) bahwa pengungkapan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan maka akan mengurangi praktik manajemen laba, dan sebaliknya semakin rendah tingkat pengungkapan hal ini berpotensi manajer melakukan manajemen laba. Namun penelitian ini bertentangan yang dilakukan oleh Kawulur *et al.* (2023) dan Wisely & Karina

(2022) mengatakan bahwa pengungkapan tidak memiliki pengaruh pada berkurangnya praktik manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H1: Tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.**

### **2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba**

Menurut teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976, saat prinsipal mempekerjakan agen dalam perusahaan, maka akan muncul permasalahan keagenan. Masalah ini terjadi apabila agen bekerja tidak sesuai tujuan dari prinsipal dan berfokus pada keuntungan pribadi. Manajer dalam mencapai keuntungan pribadi dapat memanfaatkan transaksi akrual yang memiliki keleluasaan dalam mengakui transaksi tersebut untuk tujuan pribadi

Salah satu mekanisme mengendalikan praktik manajemen laba, yaitu adanya kepemilikan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh institusi besar, organisasi, badan hukum, ataupun pemerintah. Institusi tersebut dapat berupa asuransi, bank, perusahaan berbadan hukum (PT), dan pemerintah (Singal & Putra, 2019). Kepemilikan institusional menjadi salah satu mekanisme tata kelola eksternal yang paling efektif. Hal ini disebabkan oleh akses mereka terhadap berbagai sumber yang lebih cepat dan mendalam, seperti *conference call*, laporan analis, atau bahkan komunikasi langsung dengan manajemen perusahaan. Mereka juga memiliki kapasitas finansial, keahlian analitis, dan insentif ekonomi yang kuat untuk memonitor manajer dan mencegah perilaku pelaporan keuangan yang oportunistik (Fields *et al.*, 2001)

Praktik manajer yang fokus untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dapat dimitigasi dengan adanya investor institusi. Keberadaan investor institusional menjadi penting karena mereka menuntut informasi yang relevan, tepat waktu, dan andal untuk memonitor tindakan manajemen serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi strategis. Mereka juga memiliki keahlian yang baik dalam memproses informasi, sehingga mampu mendeteksi anomali pelaporan dan menekan praktik manipulatif (Ramalingegowda *et al.*, 2020). Ada

beberapa cara yang bisa dilakukan investor institusi untuk mengendalikan manajer melakukan manajemen laba. Pertama, institusi dapat menyuarakan preferensinya secara langsung kepada manajemen melalui komunikasi privat, diskusi dengan eksekutif, serta penggunaan hak suara dalam rapat pemegang saham. Mekanisme ini memungkinkan institusi memberikan tekanan agar perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapan dan menerapkan praktik tata kelola yang lebih kuat (Carleton *et al.*, 1998) Cara kedua yang dapat dilakukan ialah institusi memiliki kekuatan untuk menekan manajemen melalui ancaman divestasi (*voting with their feet*). Jika kualitas pelaporan keuangan buruk, mereka dapat menjual saham dalam jumlah besar sehingga harga saham jatuh dan menimbulkan kerugian bagi manajer. Ancaman ini menjadi tekanan pasar yang kuat dan membuat manajer enggan melakukan manipulasi laporan keuangan (Dou *et al.*, 2018)

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Immanuel *et al.* (2022); Tiffany & Wijaya (2020); Indah & Pratomo (2022) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan institusi maka semakin baik tingkat pengawasan perusahaan tersebut sehingga mampu mengendalikan tindakan oportunistik manajer melalui kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wisely & Karina (2022), Susbiyani *et al.* (2023) dan Kablan (2020) mengatakan sebaliknya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.**

### **2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba**

Teori Keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling, pada dasarnya mencerminkan pemisahan antara kepemilikan dan kendali perusahaan. Pemisahan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan pemilik (Maharany & Oktavia, 2024). Manajer sebagai agen memiliki informasi dan akses yang lebih

banyak mengenai potensi perusahaan, kondisi internal, dan lingkungan kerja, dibandingkan prinsipal yang memiliki keterbatasan informasi. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan *agency problem*, terutama karena adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih detail mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik. Kondisi ini membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak manajemen laba oportunistik (Renaldo *et al.*, 2022).

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan praktik manajemen laba adalah besarnya ukuran perusahaan. Perusahaan berukuran besar identik dengan ukuran aset yang besar. Biasanya perusahaan besar banyak unit usaha, struktur organisasi yang rumit, transaksi yang beragam, sehingga pengawasan langsung oleh pemegang saham menjadi lebih sulit. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat kompleksitas perusahaan juga besar. Kondisi tersebut menyebabkan prinsipal semakin sulit mengawasi dan mengetahui informasi yang lengkap mengenai kondisi perusahaan. Hal tersebut yang pada akhirnya meningkatkan asimetri informasi dan membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik.

Perusahaan berukuran besar juga akan meningkatkan tekanan bagi manajer. Hal ini disebabkan semakin besar perusahaan, maka banyak pihak yang bertindak sebagai prinsipal, seperti pemegang saham publik, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Banyaknya prinsipal tersebut menyebabkan manajemen menghadapi tuntutan yang besar, sehingga meningkatkan konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Tekanan tersebut yang lama-kelamaan akan menjadi motivasi manajer melakukan manajemen laba (Joe & Ginting, 2022). Hal ini sesuai dengan konteks BUMN, di mana perusahaan BUMN berperan sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan atas nama negara. Kondisi ini memperbesar potensi konflik keagenan yaitu tekanan untuk menciptakan kinerja yang baik dimata prinsipal.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin tinggi juga potensi untuk melakukan manajemen laba. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Joe & Ginting (2022), Hardiyanti *et al.* (2022) dan Anindya *et al.* (2020). Namun tidak sesuai yang dilakukan oleh Paramita & Idayati (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik manajemen laba. Berdasarkan teori keagenan dan bukti empiris terdahulu tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.**

#### **2.5.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba**

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling Tahun 1976 menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen memiliki potensi konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan utilitas sendiri. Prinsipal mengharapkan peningkatan kesejahteraan melalui kinerja perusahaan yang optimal, sedangkan agen memiliki kepentingan pribadi seperti kompensasi, bonus, reputasi, dan jabatan. Hal tersebut akan menimbulkan konflik dan akan menjadi lebih parah lagi akibat manajer memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal. Hal tersebut menimbulkan ketidak seimbangan informasi yang akan dimanfaatkan manajer untuk melakukan perilaku oportunistik, salah satunya melalui praktik manajemen laba agar tujuannya tercapai.

Salah satu penyebab adanya manajemen laba karena tuntutan laba. Informasi laba sering kali dijadikan indikator utama dalam menilai kinerja dan keberhasilan manajemen. Hal ini menjadikan laba sebagai fokus utama bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan (Mesioye & Bakare, 2024). Adanya tekanan untuk manajer agar memenuhi ekspektasi pasar mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik atau laba dikelola untuk menghasilkan hasil yang sesuai diinginkan (Arum & Wahyudi, 2020). Manajer akan cenderung mengatur laba dan melaporkan laba yang besar untuk menarik perhatian investor walaupun tidak sesuai dengan kinerja nyata perusahaan (Safta *et al.*, 2020).

Menurut Oktavia *et al.* (2023) bahwa ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya perusahaan berhasil mencatat



laba yang tinggi, sehingga muncul ekspektasi agar kinerja tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada periode berikutnya. Ekspektasi tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi manajer untuk terus menunjukkan ROA yang baik dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, manajer memiliki tekanan untuk memenuhi target dan ekspektasi pemilik agar kondisi keuangan perusahaan tetap terlihat baik. Tekanan ini akan semakin besar ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, sehingga dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri & Naibaho (2022) dan Anasta (2019) menjelaskan semakin tinggi profitabilitas semakin besar praktik manajemen laba. Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki, sehingga menjadi indikator utama kinerja manajemen yang diperhatikan investor. Tingginya nilai ROA meningkatkan ekspektasi pemilik dan pasar terhadap kemampuan manajer dalam mempertahankan kinerja laba yang stabil, sehingga mendorong manajemen untuk mengelola laba yang dilaporkan dengan pemanfaatan diskresi akuntansi yang dimilikinya. Manajemen laba dilakukan manajer sebagai cara untuk menjaga citra kinerja perusahaan agar tetap terlihat baik di mata investor. Hal ini dikarenakan investor menyukai laba yang besar dan stabil. Selain itu, ketika profitabilitas perusahaan mengalami penurunan, manajemen juga memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba guna menghindari penilaian negatif terhadap kinerjanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dugaan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwoto (2024), Fadhillah & Kartika (2022), Bintara (2020), dan Jeniffer & Sudirgo (2020) profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joe & Ginting (2022) dan Anindya *et al.* (2020) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori keagenan dan bukti empiris terdahulu tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba**

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW), kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba.

Pada tahap pertama, penelitian ini akan mengukur tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW) masing-masing perusahaan dengan cara mengidentifikasi sub item pengungkapan pada situs *web* emiten yang berdasarkan pada POJK No. 8 Tahun 2015. Selanjutnya, dihitung indeks skor TPIKBW yang diungkapkan terhadap skor maksimal pengungkapan. Penelitian ini akan menggunakan bantuan <https://web.archive.org/> untuk mengakses *setting website* perusahaan pada tahun yang sudah lewat dari periode saat ini. Penelitian berbasis *website* bersifat *one time research*, yaitu hanya dapat diteliti pada periode berjalan. Oleh karena itu, analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan arsip informasi yang dapat diakses pada *website* masing-masing perusahaan.

Pada proses pengambil data, terdapat perbedaan tanggal pengambilan data antar perusahaan terjadi karena tidak semua arsip tersedia pada hari yang sama. Beberapa perusahaan memiliki arsip per 31 Desember, sedangkan perusahaan lain hanya memiliki arsip pada bulan Oktober, September, atau bulan lainnya. Perbedaan arsip data antar perusahaan menjadikan data diambil dengan asumsi bahwa setiap arsip *website* mencerminkan seluruh pengungkapan informasi perusahaan selama satu tahun buku.

Pada tahap kedua, penelitian ini akan mengukur kepemilikan saham institusional yang diukur menggunakan perbandingan persen nilai saham yang dimiliki institusi terhadap keseluruhan saham yang beredar. Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder, yaitu laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan pada tahun yang sama dengan data manajemen laba yaitu periode 31 desember. Pada tahap ketiga, penelitian ini akan menggunakan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan  $\ln(\text{total aset})$  yang menggunakan sumber data pada periode yang sama dengan variabel manajemen laba.

Pada tahap keempat, penelitian ini akan menggunakan rasio *Return on Assets* untuk menghitung tingkat profitabilitas perusahaan tahun sebelumnya ( $t-1$ ) sehingga diperlukan data laporan tahunan periode 2019-2023. Sedangkan variabel manajemen laba menggunakan data laporan tahun periode 2020-2024.

Penggunaan variabel lag-1 bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan periode sebelumnya terhadap praktik manajemen laba pada periode berjalan. Manajer cenderung mempertimbangkan kinerja masa lalu dalam mengambil keputusan akuntansi. Selain itu, penggunaan ROA lag-1 dilakukan untuk menghindari bias karena laba pada periode berjalan berpotensi dipengaruhi oleh praktik manajemen laba.

## **3.2 Populasi Dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan unsur atau objek dalam suatu bidang penelitian yang menjadi perhatian peneliti (Kothari, 1990). Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

### **3.2.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari keseluruhan populasi atau totalitas untuk membuat penilaian atau kesimpulan mengenai seluruh populasi tersebut (Kothari, 1990). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN terdaftar BEI secara berturut-turut dari periode 2020-2024.
2. Perusahaan BUMN terdaftar BEI yang memiliki arsip informasi diperlukan di *website* perusahaan yang dapat diakses.
3. Perusahaan BUMN terdaftar BEI yang menyajikan data lengkap berdasarkan informasi dari laporan keuangan dan laporan tahunan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder tersebut berasal dari laporan keuangan, laporan tahunan, serta *website* resmi perusahaan yang dapat diakses selama periode 2020–2024, termasuk buku, artikel, dan dokumen pendukung lainnya. *Website* perusahaan bersifat *one time research*, artinya hanya dapat diakses pada waktu tertentu.

Cara yang dilakukan untuk memperoleh data arsip tahun 2020-2024, peneliti memanfaatkan <https://web.archive.org/> *website* bernama “Wayback Machine” sebagai alat untuk mengakses versi terdahulu dari halaman *website* perusahaan. *Website* tersebut membantu melihat arsip settingan perusahaan pada tahun tertentu selama datanya diarsipkan sebelumnya.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen meliputi tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW), kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Manajemen laba merupakan manipulasi variabel akuntansi atau melakukan tindakan nyata tertentu guna mencapai tujuan laba yang dilaporkan secara spesifik (Scott, 2015). Manajemen laba diukur dengan menggunakan Model Modified

Jones karena lebih *powerful* dalam mengukur manajemen laba (Lestari & Wulandari, 2019). Model Modified Jones dipilih karena model ini hadir untuk memperbaiki kelemahan model sebelumnya dengan memperhitungkan piutang sebagai jenis aset yang dapat diatur oleh manajer untuk tindakan oportunistik.

Model Modified Jones digunakan untuk mengukur kualitas laba perusahaan melalui *Directionary Accrual* (DA). Nilai DA diasumsikan apabila bernilai positif berarti manajer cenderung melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba. Sebaliknya, nilai DA negatif menunjukkan manajer melakukan manajemen laba dgn menurunkan laba (Epps & Guthrie, 2010).

Adapun tahapan yang dilakukan dalam mengukur manajemen laba menggunakan Model Modified Jones yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung total *accrual* dengan persamaan:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Menghitung nilai total *accrual* (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

$$(TAC_t / A_{t-1}) = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1}) + e$$

3. Dengan menggunakan koefisien regresi OLS, nilai *Nondisrectionary Accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1})$$

4. Menghitung *Directionary Accrual* yang menjadi ukuran manajemen laba menggunakan rumus:

$$DAC_{it} = (TAC_{it} / A_{it-1}) - (NDA_{it} / A_{it-1})$$

**Keterangan:**

$DAC_{it}$  = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

$NDA_{it}$  = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

$TAC_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

$NI_{it}$  = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

$CFO_{it}$  = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

$TA_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

$\Delta Rev_{it}$  = Pendapatan periode t dikurangi dengan pendapatan periode t-1

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW), kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

#### 3.3.2.1 Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW) (X1)

Menurut Hayati & Suprayogi (2018) TPIKBW merupakan mekanisme penyampaian informasi yang digunakan entitas bisnis, baik informasi keuangan maupun non- keuangan melalui *website* resmi perusahaan. TPKIBW diprosikan dengan indeks yang dikembangkan oleh Alvia *et al.* (2024) indeks tersebut mengacu pada item-item yang harus diungkapkan perusahaan berdasarkan item yang tercantum dalam POJK No. 8 Tahun 2015 yang berjumlah 31 Item. Penilaian TPIKBW dengan metode analisis konten, yang mana setiap item yang tercantum dalam *website* diberi skor 1 (satu) dan 0 (nol) bila perusahaan tidak mengungkapkan item informasi dalam *website* perusahaan. Adapun 31 item yang wajib diungkapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1

**Tabel 3. 1 Sub Item Pengungkapan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015**

Jenis Informasi	Item/Sub Item Pengungkapan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015
Informasi Umum emiten (Pasal 7)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama, alamat, kontak kantor pusat, serta alamat pabrik (jika ada)</li> <li>2. Riwayat singkat emiten dan struktur organisasi</li> <li>3. Struktur kepemilikan emiten</li> <li>4. Struktur grup emiten dalam bentuk bagan</li> <li>5. Profil direksi, dewan komisaris, komite, dan sekretaris perusahaan</li> <li>6. Dokumen anggaran dasar</li> </ol>
Informasi Untuk Investor (Pasal 8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prospektus penawaran umum</li> <li>2. Laporan tahunan untuk 5 tahun terakhir</li> <li>3. Informasi keuangan</li> <li>4. Informasi RUPS</li> <li>5. Informasi saham</li> <li>6. Informasi obligasi</li> <li>7. Informasi dividen</li> </ol>

Jenis Informasi	Item/Sub Item Pengungkapan Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015
Informasi Tata Kelola Perusahaan (Pasal 9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Informasi mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten</li> <li>9. Informasi atau fakta material</li> <li>1. Pedoman kerja direksi serta dewan komisaris</li> <li>2. Pengangkatan, pemberhentian, atau kekosongan sekretaris perusahaan</li> <li>3. Piagam unit audit internal</li> <li>4. Kode etik emiten</li> <li>5. Pedoman kerja komite</li> <li>6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit</li> <li>7. Prosedur nominasi dan remunerasi</li> <li>8. Kebijakan manajemen risiko</li> <li>9. Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran</li> <li>10. Kebijakan anti korupsi</li> <li>11. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur</li> <li>12. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor</li> </ol>
Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Pasal 10)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait lingkungan hidup</li> <li>2. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait ketenagakerjaan</li> <li>3. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan</li> <li>4. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait tanggung jawab produk dan jasa</li> </ol>

Sumber: POJK (2015)

Skor Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) dihitung menggunakan indeks Wallace, yaitu dengan membandingkan total skor yang diperoleh perusahaan terhadap skor maksimum yang dapat dicapai (Alvia *et al.*, 2024). Perusahaan dikatakan baik apabila mengungkapkan 100% item yang diwajibkan oleh POJK No. 8 Tahun 2015.

$$IPIK = \frac{\sum \text{Skor yang diperoleh perusahaan}}{\sum \text{Skor Maksimal}}$$

Peneliti menggunakan proksi TPIKBW yang dikembangkan oleh Alvia *et al.* (2024) karena landasan peraturan yang digunakan menjadi kewajiban seluruh perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN terdaftar BEI, untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan di *website* perusahaan. Proksi ini memiliki item yang lengkap dan sesuai dengan karakteristik perusahaan.

### 3.3.2.2 Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti bank, perusahaan asuransi, pemerintah, maupun badan hukum lainnya. Kepemilikan institusional umumnya memiliki saham untuk tujuan keberlanjutan, seperti investasi jangka panjang (Alkurdi *et al.*, 2021). Penelitian ini menggunakan proksi yang dikembangkan oleh Bushee (1998), yaitu membagi total saham dimiliki dengan total saham beredar. Hal ini didasarkan bahwa proksi ini memiliki kelebihan, yaitu dapat melihat variasi tingkat kepemilikan institusi yang dimiliki masing-masing perusahaan. Perhitungan indikator kepemilikan institusional dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total Saham Dimiliki Institusi}}{\text{Total Seluruh Saham Beredar}}$$

### 3.3.2.3 Ukuran Perusahaan (X3)

Menurut Brigham & Houston (2001) dalam Rahmawati *et al.* (2022) adalah gambaran besar kecilnya perusahaan yang mencerminkan skala operasional yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam hal modal dan operasional. Proksi ukuran perusahaan yang digunakan adalah  $\ln(\text{Total aset})$ . Pengukuran ini menggunakan logaritma total aset (Machfoedz, 1994). Proksi ini dipilih karena menunjukkan besarnya kekayaan, sumber daya, dan kemampuan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Total Aset} = \ln(\text{Total Aset})$$

### 3.3.2.4 Profitabilitas

Menurut Thian (2022) profitabilitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi perusahaan. Proksi ROA bisa menilai kinerja manajemen dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, baik modal maupun aset tetap, sehingga lebih tepat untuk dianalisis hubungannya dengan praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan manajer sering mengatur laba berdasarkan keseluruhan kapasitas aset perusahaan. Penelitian ini akan



menggunakan rasio *Return on Assets* untuk menghitung tingkat profitabilitas perusahaan tahun sebelumnya (t-1) sehingga diperlukan data laporan tahunan periode 2019-2023. Penggunaan variabel lag-1 bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan periode sebelumnya terhadap praktik manajemen laba pada periode berjalan. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = (\text{Laba Tahun Berjalan} / \text{Total Aset})$$

Berdasarkan definisi operasional dan pengukuran variabel, maka dapat dirangkum pada tabel 3.2

**Tabel 3. 2 Indikator Pengukuran Seluruh Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Manajemen Laba	Manajemen laba merupakan manipulasi variabel akuntansi atau melakukan tindakan nyata tertentu guna mencapai tujuan laba yang dilaporkan secara spesifik (Scott, 2015)	<b>DAC = TAC – NDA</b> (Dechow <i>et al.</i> , 1995)
Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis <i>Website</i> (TPIKBW)	TPIKBW merupakan mekanisme penyampaian informasi yang digunakan entitas bisnis, baik informasi keuangan maupun non-keuangan melalui <i>website</i> resmi perusahaan (Hayati & Suprayogi, 2018)	<b>IPIK POJK No.8 Tahun 2015 = Total Skor Diungkapkan / Total Skor Maksimal</b> (Alvia <i>et al.</i> , 2024)
Kepemilikan Institusional	Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh organisasi atau institusi, baik di dalam maupun luar negeri, seperti bank, perusahaan asuransi, pemerintah dan perusahaan badan hukum (Singal & Putra, 2019).	<b>KI = Jumlah saham dimiliki institusi / Jumlah saham beredar</b> (Bushee, 1998)
Ukuran Perusahaan	Menurut Brigham & Houston (2001) gambaran besar kecilnya perusahaan yang mencerminkan skala operasional.	<b>Ln(Total Aset)</b> (Machfoedz, 1994)
Profitabilitas	Profitabilitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi perusahaan (Thian, 2022).	<b>ROA= Laba Tahun Berjalan / Total Aset)</b> (Thian, 2022)

Sumber: Diolah oleh penulis

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode yang dipakai guna menganalisis data ialah analisis regresi linier berganda, guna mendukung pengujian statistik. Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak (*software*) IBM SPSS *Statistics* 27.

#### **3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif membantu peneliti mendapatkan kesan pertama yang akurat tentang bagaimana data tersebut terlihat melalui ukuran-ukuran seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan terkait objek yang akan diteliti tanpa harus menarik kesimpulan terlebih dahulu. Metode deskriptif data yang telah dikumpulkan akan lebih mudah dibaca sehingga peneliti akan dapat lebih cepat menguraikan hasil penelitiannya (Salkind, 2018).

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilaksanakan guna membuktikan bahwa model regresi yang dipakai dapat memberikan hasil perkiraan yang akurat, objektif, dan dapat diandalkan (Gujarati & Porter, 2013). Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

##### **A. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov (K-S) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dinilai memenuhi asumsi normalitas (Gujarati & Porter, 2013).

## **B. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai  $VIF > 10$  atau nilai toleransi  $< 0,10$ , maka terdapat multikolinearitas dalam model regresi.
2. Jika nilai  $VIF < 10$  dan nilai toleransi  $> 0,10$ , maka model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

## **C. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians pada residual dalam model regresi (Ghozali, 2018). Ketidaksamaan varians menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sedangkan kesamaan varians menunjukkan kondisi homoskedastisitas, yang merupakan kondisi ideal dalam regresi.

Identifikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila variabel independen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap nilai absolut residual, maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 0,05, di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

## **D. Uji Autokorelasi**

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah residual pada periode ke- $t$  memiliki hubungan dengan residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Menurut Ghozali (2018), autokorelasi muncul ketika terdapat hubungan antar observasi yang tersusun secara berurutan dalam suatu rangkaian waktu. Untuk mendeteksi

kondisi tersebut, digunakan uji Durbin–Watson (DW). Uji Durbin–Watson digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi tingkat pertama dengan asumsi bahwa model regresi mencakup konstanta dan tidak melibatkan variabel dependen maupun independen dalam bentuk lag. Model tidak terjadi autokorelasi apabila memiliki nilai diantara dU dan 4dU atau  $dU < DW < 4 - Du$ .

### 3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan satu model yang dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen (Kothari, 1990).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Manajemen Laba

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Regresi

X1 : TPIKBW

X2 : Kepemilikan Institusional

X3 : Ukuran Perusahaan

X4 : Profitabilitas

$\varepsilon$  : Error

### 3.4.4 Uji Hipotesis

#### 3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghazali (2018) Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> berada pada rentang antara 0 hingga 1. Nilai R<sup>2</sup> yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan nilai R<sup>2</sup> yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen dalam model.

#### **3.4.4.2 Uji t**

Menurut Ghozali (2018) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan mengenai ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen didasarkan pada nilai signifikansi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.)  $> 0,05$ , maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.4.4.3 Uji f**

Menurut Ghozali (2018) Uji f digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh simultan seluruh variabel independen, variabel kontrol, dan variabel moderasi terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW), Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada BUMN terdaftar BEI periode 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil statistik menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,608 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 yang berarti hasil ini tidak terbukti dan bermakna secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa semakin tinggi TPIKBW maka semakin berkurang praktik manajemen laba, tidak terdukung dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* belum mampu mengurangi praktik manajemen laba.
2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,088 yang menunjukkan arah positif. Meskipun nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan nilai tersebut signifikan namun menolak hipotesis

awal. Nilai tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa tingginya kepemilikan institusional dapat memperbesar praktik manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin berkurang praktik manajemen laba, tidak terdukung dalam penelitian ini.

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hasil statistik menunjukkan tingkat signifikan ukuran perusahaan sebesar 0.354 ( $>0,05$ ). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, tidak didukung dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya perusahaan bukan faktor utama yang menentukan ada tidaknya praktik manajemen laba. Perusahaan besar biasanya diawasi lebih ketat sehingga mampu menekan praktik manajemen laba.
4. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari ambang batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H4) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, didukung dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki ROA besar biasanya memiliki tekanan untuk terus menampilkan laba yang baik pada periode selanjutnya sehingga dilakukan manajemen laba untuk menjaga citra kinerja perusahaan agar tetap terlihat baik di mata investor.

## 5.2 Keterbatasan

Proses penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadi kekurangan peneliti saat ini dan menjadi pertimbangan peneliti di masa depan. Adapun keterbatasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN terdaftar BEI Tahun 2020-2024 sebagai objek penelitian. Hal ini membuat penelitian hanya mampu digeneralisasi pada perusahaan BUMN dan tidak dapat merepresentasikan perusahaan pada sektor lainnya.

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdapat 99 observasi selama 5 tahun yang memenuhi kriteria data. Hal ini disebabkan terdapat *outlier* yang mengharuskan pembuangan data pada tahun tertentu. Jumlah sampel yang terbatas ini berpotensi mengurangi tingkat generalisasi hasil penelitian terhadap kondisi perusahaan BUMN terdaftar BEI secara menyeluruh di Indonesia.
3. Penelitian ini dalam mengumpulkan data TPIKBW ini tidak memiliki arsip secara resmi settingan *website* perusahaan pada tahun 2020-2024 sehingga mengandalkan <https://archive.org/> untuk menemukan arsip *website* perusahaan. Oleh karena itu, terdapat keterbatasan tidak semua *website* perusahaan memiliki arsip dan dapat diakses.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai upaya perbaikan dan penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian terhadap seluruh perusahaan terdaftar di BEI. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian mampu digeneralisasi terhadap seluruh perusahaan terdaftar di BEI.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah atau memperpanjang tahun penelitian agar data yang dimiliki lebih bervariasi dan mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sumber daya lebih canggih yang memiliki lebih lengkap arsip dalam mengumpulkan data pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* dan tidak hanya mengandalkan arsip dari [https://archive.org](https://archive.org/) agar data yang diperoleh lebih akurat dan konsisten antarperiode pengamatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations*.  
<https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Agsari, R. D. (2020). The Effect of Managerial Ownership, Profitability, Solvability and Company Sizes on Profit Management in Property and Real Estate Companies Which Are in the Indonesian Stock Exchange Period 2013–2017. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(2), 82.  
<https://doi.org/10.31253/pe.v18i2.354>
- Agustin, E. P., & Widiatmoko, J. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 990–1002.
- Alkurdi, A., Hamad, A., Thneibat, H., & Elmarzouky, M. (2021). Ownership structure's effect on financial performance: An empirical analysis of Jordanian listed firms. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–21.  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1939930>
- Almilia, L. S. (2009). Determining Factors of Internet Financial Reporting in Indonesia. *Accounting and Taxation*, 1(1), 87–99.  
<https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=1555064>
- Alvia, L., Susilowati, R. Y. N., & Adriyanto, R. W. (2024). Analisis Pengungkapan Informasi Berbasis Web pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia (Sebuah Studi Analisis Konten Atas Implementasi POJK No. 8 Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29(2), 116–125.  
<https://doi.org/http://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2577>
- Alzoubi, E. S. S. (2016). Disclosure quality and earnings management: Evidence from Jordan. *Accounting Research Journal*, 29(4), 429–456.  
<https://doi.org/10.1108/ARJ-04-2014-0041>
- Anasta, L. (2019). The Effect of Profitability and Tax Avoidance on Profit Management and Its Impact on Company Value. *European Journal of Business ajnd Management*, 11(27), 32–46. <https://doi.org/10.7176/EJBM>
- Anindya, W., Nur, E., & Yuyetta, A. (2020). Pengaruh Leverage , Sales Growth , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(3), 1–14.

- Arum, E. D. P., & Wahyudi, I. (2020). Fraudulent Financial Reporting Detection in Banking Sector: Evidence from Indonesia 1. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 199–211.
- Bintara, R. (2020). Asean Corporate Governance Scorecard, Financial Performance, and Disclosure of Corporate Social Responsibility on Firm Value. *International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 3(1), 191–202. <https://doi.org/10.36713/epra4799>
- Burhan, M. C., & Malau, H. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dan umur perusahaan terhadap praktik perataan laba. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 26–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.440>
- Bushee, B. J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. *The Accounting Review*, 73(305–333). <https://www.jstor.org/stable/248542>
- Carleton, W. T., Nelson, J. M., & Weisbach, M. S. (1998). The influence of institutions on corporate governance through private negotiations: Evidence from TIAA-CREF. *Journal of Finance*, 53(4), 1335–1362. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00055>
- Catherine, J., & Morrison, P. (2006). Corporate Social Responsibility and Economic Performance Catherine. *Journal of Productivity Analysis*, 26(3), 207–211. <https://doi.org/10.1080/00036846.2012.676734>
- Cinthya, M. T., Novitasari, L. G., & Dewi, N. L. P. S. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Ukuran Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 169–179.
- CNBC. (2019). *Menyoal Laba BUMN yang Mendadak Kinclong*. CNBC. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190531144248-92-400048/menyoal-laba-bumn-yang-mendadak-kinclong>
- Dafitra, V. R., & Alvia, L. (2023). International Journal of Research Publication and Reviews Analysis of Compliance Level of Issuers in Disclosing Corporate Information Based on Website Post Implementation of POJK No 8 of 2015. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(7), 567–573.
- Davis, J. G., & Cestona, M. G. (2023). Institutional Ownership, Earnings Management and Earnings Surprises : Evidence From 39 Years of U.S. Data. *Journal of Economics Finance and Administrative Science (JEFAS)*, 28(56), 218–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2023-0021>
- De Angelo, L. E. (1986). Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. *The Accounting Review*, 61(3), 400–420. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/247149>
- Dechow, P. M., & Sloan, R. G. (1991). Executive Incentives and The Horizon

- Problem: An Empirical Investigation. *Journal of Accounting and Economics*, 14(1), 51–89. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-7187\(91\)90058-S](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-7187(91)90058-S)
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1996.tb00489.x>
- Dewi, F. G., Komalasari, A., & Alvia, L. (2024). Komite Audit, Financial Distress, Dan Manajemen Laba: Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29(1), 49–59. <https://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2549>
- Dou, Y., Hope, O. K., Thomas, W. B., & Zou, Y. (2018). Blockholder Exit Threats and Financial Reporting Quality. *Contemporary Accounting Research*, 35(2), 1004–1028. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12404>
- El Diri, M., Lambrinoudakis, C., & Alhadab, M. (2020). Corporate Governance and Earnings Management in Concentrated Markets. *Journal of Business Research*, 108, 291–306. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.013>
- Epps, R. W., & Guthrie, C. P. (2010). Sarbanes-Oxley 404 material weaknesses and discretionary accruals. *Accounting Forum*, 34(2), 67–75. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2008.11.002>
- Fadhilah, A., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus Kas Bebas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 25–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.593>
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademisi, Manajer dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan* (Satu). Alfabeta.
- Faradhifa, C., & Handayani, A. (2024). Earnings Management in View of Information Asymmetry, Audit Tenure and Company Size: An Empirical Study. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 11(2), 35–44. <https://doi.org/10.55963/jraa.v11i2.657>
- Fields, T. D., Lys, T. Z., & Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 255–307. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00028-3](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00028-3)
- Ghofir, A., & Yusuf. (2020). Effect of Firm Size and Leverage on Earning Management. *Journal of Industrial Engineering & Maagement Research*,

- 1(3), 218–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.7777/jiemar> Effect
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita, L., Artika, A., Suputra, I. D. G. D., & Economics, F. O. (2019). The Effect of Disclosure of Financial Report and Managerial Ability on Earnings Management with Audit Quality as a Moderating Variable. *Research Journal Od Finance and Accounting*, 1697, 32–39. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Goodstats. (2023). *Menilik Laba Bersih BUMN 5 Tahun Terakhir, Sentuh Rp180 Triliun Pada 2023*. GoodStats.
- Gujarati, D. ., & Porter, D. . (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Gunawan, I. K., Darmawan, N. A. S., & Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JIMAT (Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5272>
- Halim, J., Meiden, C., & Tobing, R. L. (2005). Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Termasuk Dalam Indeks Lq-45. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 8(2), 15–16.
- Hardiyanti, W., Kartika, A., & Sudarsi, S. (2022). Analisis Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Leverage dan Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4071–4082. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1035>
- Hartono, J. (2019). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE-Yogyakarta.
- Hartono, J. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Keenam). BPFE-Yogyakarta.
- Hayati, P. S. D., & Suprayogi, N. (2018). Analisis Perbandingan Internet Financial Reporting Index Bank Umum Syariah Di Indonesia , Malaysia , Iran ,. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 48–63.
- Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes Decisions On Accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1–3), 85–107. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101\(85\)90029-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101(85)90029-1)
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Mandar Maju.
- ICW. (2022). *Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor*

- Finansial*. Indonesian Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>
- Immanuel, G. R., Akuntansi, P. S., Manajerial, K., Independen, D. K., & Ownership, M. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1585–1594.
- Indah, N. N., & Pratomo, D. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba dengan Variabel Kontrol Profitabilitas dan Leverage. *E-Proceeding of Management*, 9(2), 486–493.
- Indahningrum, R. P., & Handayani, R. (2009). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Bisnis Akuntansi*, 11(3), 189–207.
- Jeniffer, V., & Sudirgo, T. (2020). The Influence Of Information asymmetry, Profitability, Leverage, And Growth on Earnings Management. *Jurnal Paradigma Akuntanso*, 2(4), 1641–1651. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9359>
- Joe, S., & Ginting, S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1(3), 567–574. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1505>
- Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228.
- Kablan, M. A. (2020). The Effect of Ownership Structure on Earnings Management Practices Toward Achieving the Real Comprehensive Income " An Applied Study on the Listed Companies in Libyan Stock Market ". *Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice*, 12. <https://doi.org/10.5171/2020.508160>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kawulur, A. F., Tala, O. Y., & Katuhu, Y. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 577–585.
- Kirana, R., Hasan, A., & Hardi. (2016). Pengaruh Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan, Kecakapan Manajerial, dan Risiko Ligitasi Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(2), 189–205.
- Kothari, C. R. (1990). *Research Methodology Methods and Techniques* (Second

Rev). New Age International Publisher.

- Kurniawansyah, D. (2018). Apakah Manajemen Laba Termasuk Kecurangan ? : Analisis Literatur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.97>
- Lestari, K. C., & Wulandari, S. O. (2019). Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba (studi kasus pada bank yang terdaftar di bea tahun 2016-2018). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(April), 20–35.
- Lestiawati, D. A., & Trisnawati, I. T. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Earnings Management pada Perusahaan di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 1001–1012.
- Liputan. (2019). *Sri Mulyani Sebut Direktur BUMN yang Korupsi Sebagai Pengkhianat*. Liputan. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4078396/sri-mulyani-sebut-direktur-bumn-yang-korupsi-sebagai-pengkhianat>
- Machfoedz, M. (1994). Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earnings Changes in Indonesia. *Kelola: Gajah Mada University Business Review*, 7(3).
- Maharany, G. L., & Oktavia, R. (2024). APakah Manajemen Laba Merusak Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Informasi Keuangan ? *Journal of Applied and Accounting Science*, 5(2), 182–193.
- Mesioye, O., & Bakare, I. A. (2024). Evaluating Financial Reporting Quality: Metrics, Challenges, and Impact on Decision-Making. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(10), 1144–1156. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.1024.2735>
- Oktavia, R., Alvia, L., & Octary, A. D. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Tekanan Finansial Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 28(2), 206–218. <https://doi.org/http://doi.org/10.23960/jak.v28i2.1966>
- Paramita, D. K., & Idayati, F. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/JIRA/article/view/2801>
- Pervan, I. (2005). Financial Reporting On The Internet And The Practice Of Croatian Joint Stock. *Financial Theory and Practice*, 29(2), 159–174.
- POJK. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/ POJK. 04/ 2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Powell, L., Jubb, C., De Lange, P., & Langfield-Smith, K. (2005). The Distinction between Aggressive Accounting and Financial Reporting Fraud: Perceptions of Auditors. *AFAANZ Conference 2005*, 37.

<http://afaanz.org/html/web2005/papers/powelll-INT.pdf>

- Purwoto, A. F. D. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Non-Kuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1–15. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1380>
- Putri, M., & Naibaho, E. A. B. (2022). The Influence of Financial Distress, Cash Holdings, and Profitability Toward Earnings Management With Internal Control As A Moderating Variable: The Case of Listed Companies In ASEAN Countries. *Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*, 19(1), 120–138. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.06>
- Rachmawati, A., & Triatmoko, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1), 1–26.
- Rahmawati, A. D., Hermuningsih, S., & Wiyono, G. (2022). *Insider Ownership, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen* (N. Duniawati (ed.); Satu). Penerbit Adab.
- Ramalingegowda, S., Utke, S., & Yu, Y. (2020). Common Institutional Ownership and Earnings Management. *Contemporary Accounting Research*, 38(1), 208–241. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12628>
- Renaldo, N., Suharti, Suyono, & Suhardjo. (2022). *Manajemen Laba Teori dan Pembuktian* (T. Chandra (ed.); Satu). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ronibasa, B. Y., & Siregar, S. V. (2020). The effect of international financial reporting standards adoption on the earnings management of oil companies which are experiencing oil price decline shock. *International Journal of Business and Globalisation*, 26(1–2), 71–91. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2020.109824>
- Rustan. (2023). Struktur Kepemilikan & Kebijakan Hutang (Strategi Perusahaan dalam Mengelola Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Hutang Untuk Mencapai Tujuan Bisnis). In *Penerbit Agma*.
- Safta, I. L., Achim, M. V., & Borlea, S. N. (2020). Manipulation of Financial Statements Through the Use of Creative Accounting. Case of Romanian Companies. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Economics Series*, 30(3), 90–107. <https://doi.org/10.2478/sues-2020-0019>
- Saghafi, S. (2016). Examining the Relationship Between Disclosure Level, Ownership Structure and Earning Management in the Tehran Stock Exchange. *Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 6(JLYSPCL), 1123–1134. <https://doi.org/10.7456/1060jse/081>
- Salkind, N. J. (2018). *Exploring Research* (Edisi Semb). Pearson.

www.pearsonglobaleditions.com

- Saniamisha, I. M., & Jin, T. F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Dan Akutansi*, 21(1), 59–72. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Sari, N. P., & Khafid, M. (2020). Peran Kepemilikan Manajerial dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2). <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8773>
- Scott, W. R. (2015a). *Financial Accounting Theory* (Seventh Ed). Pearson. [www.pearsoncanda.ca](http://www.pearsoncanda.ca)
- Scott, W. R. (2015b). Instructor's Solution Manual for Financial Accounting Theory. In *Pearson*. Pearson.
- Shenglan, C., Ma, H., Wu, Q., & Zhang, H. (2023). Does common ownership constrain managerial rent extraction? Evidence from insider trading profitability. *Journal of Corporate Finance*, 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102389>
- Singal, P. A., & Putra, I. N. W. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility Patrisia. *E-Journal Akuntansi*, 298(1), 468–484.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sulistiawan, D., Januarsi, Y., & Alvia, L. (2024). *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat.
- Susbiyani, A., Fauzan, D. T., & Aspirandi, R. M. (2023). Analysis of Earnings Management : Using Ownership Structure and Audit Quality Among Banking Industries in Indonesia. *South Asian Journal of Finance*, 3(2), 83–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.4038/sajf.v3i2.69> ISSN
- Thian, A. (2022). *Analisis Laporan Keuangan* (Aldila (ed.); Edisi Satu). Penerbit ANDI.
- Tiffany, D., & Wijaya, H. (2020). Denis Tiffany dan Hanna Wijaya : ” The Effect of Corporate Governance on Earnings Management ” 73. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 72–85.
- Utari, N. P. L. A. U., & Sari, M. M. R. (2016). Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada



- Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 1886–1914.
- Wahyuningsih, D. (2020). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan dan Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(September), 265–286.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i2.6254>
- Wang, J., Tian, X., & Ma, X. (2023). Common Institutional Ownership and Analyst Earnings Forecasts. *International Review of Economics & Finance*, 96.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103522>
- Widnyana, I. W., Herdiansyah, E., & Paramachintya, M. W. V. S. (2025). *Profitabilitas: Konsep, Rasio, dan Strategi Keuangan* (Edisi Pert). Wawasan Ilmu.
- Wisely, N. A., & Karina, R. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pengungkapan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 209–226.
- Xiao, Z., Jones, M. J., & Lymrt, A. (2002). European Accounting Review Immediate trends in Internet reporting. *European Accounting Review*, 11(November 2014). <https://doi.org/10.1080/09638180020017087a>